

LAPORAN

AKUNTABILITAS KINERJA

BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI

TAHUN ANGGARAN 2022



**BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI
BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA
PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI**

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2022 Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri telah dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2022 merupakan pelaksanaan amanah Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang selanjutnya dipertegas melalui Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Setiap Kementerian/Lembaga harus menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK), sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2022 bertujuan untuk mengetahui pencapaian target pada unit kerja di lingkungan BBSPJPPI yaitu keberhasilan capaian yang terukur setiap tahunnya, berdasarkan Rencana Kinerja yang disusun tahun 2022. Laporan Akuntabilitas Kinerja merupakan suatu perwujudan transparansi dan akuntabilitas kinerja BBSPJPPI karena laporan ini memuat rencana kerja (*performance plan*) berdasarkan rencana strategis yang telah dirumuskan, capaian kinerja (*result performance*) dan kendala yang dihadapi selama tahun 2022. Laporan ini juga dapat digunakan sebagai tolok ukur sinkronisasi antara rencana kerja dan hasil yang dicapai.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dibuat agar dapat menjadi informasi dan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan program kegiatan kedepannya. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu saran yang membangun sangat kami harapkan. Kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini kami ucapkan terima kasih.

Semarang, Februari 2023

Plt Kepala BBSPJPPI, *ja*


Herman Supriadi

IKHTISAR EKSEKUTIF

Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPPI) merupakan satker di bawah Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) yang memiliki kompetensi di bidang penanganan pencemaran industri. Dengan dukungan sarana prasarana berikut kompetensi SDM yang dimiliki, BBSPJPPI berkontribusi dalam pemberian layanan jasa teknis di bidang standardisasi dan penanganan permasalahan industri di bidang lingkungan. Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.05/2010 tanggal 5 Februari 2010 telah ditetapkan menjadi satker yang menerapkan sistem pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) di bawah pembinaan teknis Badan Standardisasi Kebijakan dan Jasa Industri.

Dalam mendukung capaian kinerja Kementerian Perindustrian dan BSKJI, BBSPJPPI memiliki 8 (Delapan) Sasaran Strategis dan 13 (tiga belas) Indikator Kinerja yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (Perkin) BBSPJPPI Tahun 2022. Dimana seluruh Target kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja dapat tercapai. Pada Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas Kinerja capaian sesuai rekap BSKJI 77,07 dengan target 76. Hal ini dapat ditingkatkan dengan memfasilitasi pegawai untuk mengikuti diklat baik fungsional /seminar/webinar/pelatihan teknis. Selain itu sikap proaktif pegawai yang setelah mengikuti Diklat/Bimtek/Seminar/Webinar mengumpulkan bukti ke Bagian Kepegawaian untuk didata dan direkap.

Berkaitan dengan dukungan anggaran, pada 2022 BBSPJPPI memperoleh alokasi anggaran awal sebesar Rp. 31.694.002.000,- yang dalam pelaksanaannya mengalami 11 (sebelas) kali proses revisi anggaran. Berdasarkan pengesahan DIPA revisi terakhir, anggaran BBSPJPPI mengalami perubahan menjadi sebesar Rp. 31.491.998.000,- yang terdiri dari anggaran Rupiah Murni sebesar Rp. 16.486.998.000 dan PNBP tahun berjalan sebesar Rp. 15.005.000.000,-. Adapun capaian realisasi anggaran sampai akhir tahun 2022 sebesar 98,25% dimana besaran realisasi anggaran Rupiah Murni sebesar 99,70% dan realisasi anggaran PNBP sebesar 96,65%. Besaran realisasi keuangan BBSPJPPI tahun 2022 diatas target yang ditetapkan BSKJI.

Capaian target kinerja jasa layanan satker BBSPJPPI sampai dengan akhir 2022 tercapai dengan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp. 14.809.403.248,- atau 98,69% dari target penerimaan yang ditetapkan sebesar Rp. 15.005.000.000,-. Realisasi tersebut berdasarkan pelaksanaan pemberian jasa layanan teknis kepada 720 pelanggan sektor industri dan 184 pelanggan non industri. Komposisi penerimaan PNBP utamanya masih ditopang dari layanan jasa

pengujian yang berkontribusi sebesar 82,3% dan layanan sertifikasi 12,2% dari total penerimaan di tahun 2022.

Upaya kedepannya untuk mengoptimalkan upaya penerimaan PNBPN dapat dilakukan melalui pengembangan kapasitas jasa layanan (pengembangan lingkup layanan baru diantaranya sertifikasi halal, verifikasi GRK, verifikasi TKDN, uji profisiensi) serta peluang sumber penerimaan baru dengan mendorong komersialisasi produk inovasi teknologi yang dimiliki BBSPJPPI (teknologi AiMS, dll). Tindak lanjut pengajuan usulan perubahan tarif BLU BBSPJPPI juga perlu segera dilakukan dengan berkoordinasi baik dengan unit internal Kemenperin (BSKJI, Biro Keuangan) maupun dengan pihak eksternal (Dit. PPK BLU). Untuk mendorong capaian realisasi penerimaan PNBPN tahun berjalan juga dapat dilakukan dengan melakukan monitoring piutang dan penyelesaian tagihan pembayaran piutang atas jasa layanan, kedepannya perlu dilakukan koordinasi intensif antara bagian keuangan dengan bagian teknis yang dapat memudahkan penyampaian kelengkapan dokumen penagihan ke pelanggan

Berkaitan dengan penerapan akuntabilitas kinerja pemerintah, BBSPJPPI telah melakukan perencanaan program kegiatan yang selaras dengan Renstra BBSPJPPI dan BSKJI serta melakukan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala. Demikian pula dengan aspek pengelolaan serta pelaporan keuangan dan BMN telah dilakukan secara akuntabel. Berkenaan dengan hal tersebut, maka pada 2022 terkait penilaian akuntabilitas kinerja, BBSPJPPI memperoleh penilaian SAKIP dengan nilai 81,65 (kategori A) serta nilai pelaporan keuangan sebesar 97.

Untuk selanjutnya, hasil evaluasi atas pelaksanaan kegiatan tahun 2022 akan digunakan sebagai bahan masukan untuk perbaikan pada pelaksanaan program kegiatan BBSPJPPI tahun berikutnya.

Semarang, Februari 2023

Plt Kepala BBSPJPPI,



Herman Supriadi

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	ii
Daftar Isi	iv
Bab I. PENDAHULUAN	1
1.1. Tugas Pokok dan Fungsi	1
1.2. Peran Strategis Organisasi	2
1.3. Struktur Organisasi	3
Bab II. PERENCANAAN STRATEGI DAN PERJANJIAN KINERJA	6
2.1. Rencana Strategis Organisasi	6
2.2. Rencana Kinerja Tahun 2022	11
2.3. Rencana Anggaran	13
2.4. Dokumen Penetapan Kinerja	17
Bab III. AKUNTABILITAS KINERJA	31
3.1. Analisis Capaian Kinerja	31
3.1.1. Analisis Capaian Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja TA. 2022	43
3.1.2. Capaian Program prioritas Nasional TA 2022	73
3.2. Akuntabilitas Keuangan	73
3.3. Analisis Sumber Efisiensi Sumber Daya Secara Umum	94
3.4. Penghargaan yang diperoleh Satker	97
Bab IV. Penutup	99
4.1. Kesimpulan	99
4.2. Permasalahan dan Kendala	100
4.3. Saran	100

LAMPIRAN :

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2022
2. Pengukuran Kinerja Tahun 2022
3. Realisasi Rencana Aksi Perjanjian Kinerja TA. 2022
4. Realisasi Renstra Satker/ Unit Kerja (2020-2024)

BAB I PENDAHULUAN

1.1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPPI) yang dibentuk sebagai Unit Pelaksana Teknis berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI), sesuai penataan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BSKJI berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2022 memiliki tugas melaksanakan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dan industri 4.0, industri hijau dan pelayanan jasa industri di bidang pencegahan pencemaran industri. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, BBSPJPPI akan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan analisis, penerapan dan pengawasan standardisasi di bidang pencegahan pencemaran industri;
- b. Pelaksanaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri di bidang pencegahan pencemaran industri;
- c. Pendampingan dan konsultasi di bidang standardisasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, industri 4.0, industri hijau dan jasa industri di bidang pencegahan pencemaran industri;
- d. Pelaksanaan pengujian, kalibrasi, inspeksi teknis, penyelenggara uji profisiensi, produsen bahan acuan, dan verifikasi di bidang pencegahan pencemaran industri;
- e. Pelaksanaan sertifikasi sistem manajemen, produk, teknologi, dan industri hijau di bidang pencegahan pencemaran industri;
- f. Pelaksanaan fasilitasi kemitraan layanan jasa industri di bidang pencegahan pencemaran industri;
- g. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi.
- h. Pelaksanaan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, keuangan, organisasi, tata laksana, administrasi kerjasama, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan dan rumah tangga dan;
- i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

1.2. PERAN STRATEGIS ORGANISASI

Peran Kementerian Perindustrian dalam mendorong kemajuan industri nasional sebagai pilar perekonomian nasional sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 diantaranya dengan mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing dan maju, serta Industri Hijau. Dalam membangun peta jalan perindustrian yang berkesinambungan, Pemerintah telah menetapkan pembangunan industri untuk 20 (dua puluh) tahun ke depan dalam tiga tahapan dimana pada tahap kedua (2020-2024) pengembangan sektor industri diarahkan pada keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi yang didukung oleh SDM yang berkualitas.

Dengan adanya transformasi Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) menjadi Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) sesuai perubahan reorganisasi Kemenperin berdasarkan Perpres 107 Tahun 2020 serta mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, BSKJI memiliki tugas untuk menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, pemberlakuan, dan pengawasan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri termasuk teknologi industri 4.0, penguatan industri hijau, dan penyusunan rekomendasi kebijakan jasa industri.

Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Besar di bawah koordinasi BSKJI, BBSPJPPI memiliki peranan untuk memastikan bahwa kebijakan yang telah ditetapkan di tingkat Kementerian Perindustrian maupun BSKJI selaku pembina teknis dapat berjalan dan terlaksana dalam rangka mewujudkan pemerataan pembangunan industri. Peranan yang dijalankan BBSPJPPI diantaranya melalui optimasi pemanfaatan dan penerapan teknologi sekaligus pemberian layanan jasa teknis kepada masyarakat khususnya industri utamanya terkait dengan penerapan standardisasi industri serta layanan di bidang pengendalian, penanganan dan pemantauan kualitas lingkungan industri yang mendukung pada pembangunan industri hijau.

Peranan BBSPJPPI kedepannya akan terasa krusial dalam mendukung pengembangan sektor industri. Saat ini, perhatian masyarakat global dan nasional terhadap aspek lingkungan menjadi salah satu tantangan bagi sektor industri. Strategi pembangunan industri di masa depan salah satunya diarahkan kepada industri hijau yang menekankan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelangsungan dan kelestarian fungsi lingkungan.

Hal ini tentunya merupakan peluang bagi BBSPJPPI untuk mengembangkan dan meningkatkan kapasitas jasa layanannya kepada masyarakat, khususnya sektor industri sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Berbekal kompetensi inti di bidang pengendalian pencemaran industri, BBSPJPPI memberikan pelayanan jasa teknis yang meliputi:

- i. Jasa Pelayanan Teknis Pengujian
 - Penanganan Pencemaran;
 - Pengujian Bahan dan Barang;
 - Standardisasi Pengujian Mutu Produk
- ii. Jasa Pelayanan Teknis Kalibrasi
 - Kalibrasi Peralatan dan Mesin
- iii. Jasa Pelayanan Teknis Sertifikasi
 - Sertifikasi Sistem Mutu
- iv. Jasa Pelayanan Bimbingan dan Pendampingan Teknis
 - Pelatihan/Bimbingan Teknik Operasional;
 - Konsultasi Keteknikan dan Penerapan Standar
- v. Jasa Pelayanan Teknis Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri;
- vi. Jasa Pelayanan Inspeksi dan Verifikasi Teknis

Untuk mendukung sistem pengelolaan keuangan yang lebih flexible sekaligus mengoptimalkan peran BBSPJPPI dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat industri, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 59/KMK.05/2010 tanggal 5 Februari 2010, BBSPJPPI telah menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya mengutamakan prinsip efisiensi dan produktivitas.

1.3. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam mendukung kebijakan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) dan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPPI) sesuai Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Standardisasi dan kebijakan Jasa Industri dilengkapi dengan struktur organisasi yang telah baku dengan seorang Kepala setingkat Eselon II, Bagian Tata Usaha yang dipimpin oleh Kepala Bagian Tata Usaha setingkat Eselon III dan kelompok jabatan Fungsional yang berada di bawah Bagian Tata Usaha dan bertanggung jawab langsung kepada kepala balai.

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan , program, anggaran, kepegawaian, keuangan, organisasi, tata laksana, administrasi kerja sama, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan dan rumah tangga serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Sementara Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Struktur organisasi Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri sesuai Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2022, sebagaimana bagan berikut:



Gambar 1: Struktur Organisasi BBSJPPI

Dalam pelaksanaannya, pembagian fungsi koordinasi dalam kelompok jabatan fungsional disusun dengan mengacu kepada Peta Proses Bisnis BBSJPPI yang disesuaikan dan telah mengakomodir seluruh tugas dan fungsi BBSJPPI sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2022. Untuk mengkoordinasikan dan mengelola kegiatan dari masing-masing fungsi koordinasi tersebut ditunjuk seorang pejabat fungsional sebagai Koordinator yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian.

Pembagian Fungsi Koordinasi Pelayanan Fungsional Unit Pelayanan Teknis (UPT) di Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPPI) meliputi 1) Fungsi Standardisasi, Sertifikasi dan Verifikasi; 2) Fungsi Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri dan Penyelenggara Uji Profisiensi; 3) Fungsi Pengujian dan Kalibrasi; 4) Fungsi Pengembangan Jasa industri.

a. **Data Jabatan PNS Tahun 2022 :**

Data terakhir sampai dengan 31 Desember 2022 jumlah pegawai PNS dalam lingkungan BBSPJPPI yaitu 109 personil, jika dirinci menurut jabatannya adalah sebagai berikut:

1) Jabatan struktural	: 2 personil
2) Fungsional Pembina Industri	: 11 personil
3) Fungsional Perekayasa	: 7 personil
4) Fungsional Litkayasa	: 14 personil
5) Fungsional Pustakawan	: 2 personil
6) Fungsional AMMI	: 6 personil
7) Fungsional Pengujian Mutu Barang	: 29 personil
8) Fungsional Arsiparis	: 3 personil
9) Fungsional Pranata Humas	: 2 personil
10) Fungsional Analis Anggaran	: 1 personil
11) Fungsional Analis Kepegawaian	: 2 personil
12) Fungsional PBJ	: 1 personil
13) Fungsional Pranata Komputer	: 1 personil
14) Fungsional Umum	: 28 personil

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS ORGANISASI

Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPPI) dalam melaksanakan tupoksi maupun dalam menjalankan proses bisnis jasa layanan selalu berpedoman pada visi dan misi yang menentukan arah, tujuan, dan sasaran pengembangan institusi serta peningkatan kompetensi di masa mendatang. Sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis BBSPJPPI 2021-2024, Visi BBSPJPPI adalah “*Menjadi badan yang akuntabel, adaptif, kolaboratif dan berorientasi pelayanan dalam mewujudkan industri nasional yang mandiri dan berdaya saing*”. Penetapan visi tersebut ditetapkan secara selaras dengan visi Presiden terpilih dan selaras dengan visi BSKJI sesuai fungsi BBSPJPPI selaku Unit Pelaksana Teknis di bawah BSKJI. Kedepannya BBSPJPPI akan fokus serta senantiasa berupaya menjadi institusi yang profesional, terpercaya dengan didukung oleh unit layanan teknis sesuai kompetensi inti yang dimiliki BBSPJPPI maupun dengan berkolaborasi dengan pihak lain, mampu untuk menangani serta memenuhi kebutuhan industri di bidang standardisasi dan jasa industri yang sesuai dengan perkembangan regulasi maupun tuntutan pertumbuhan industri dalam upaya mendukung peningkatan daya saing dan pertumbuhan industri berkelanjutan.

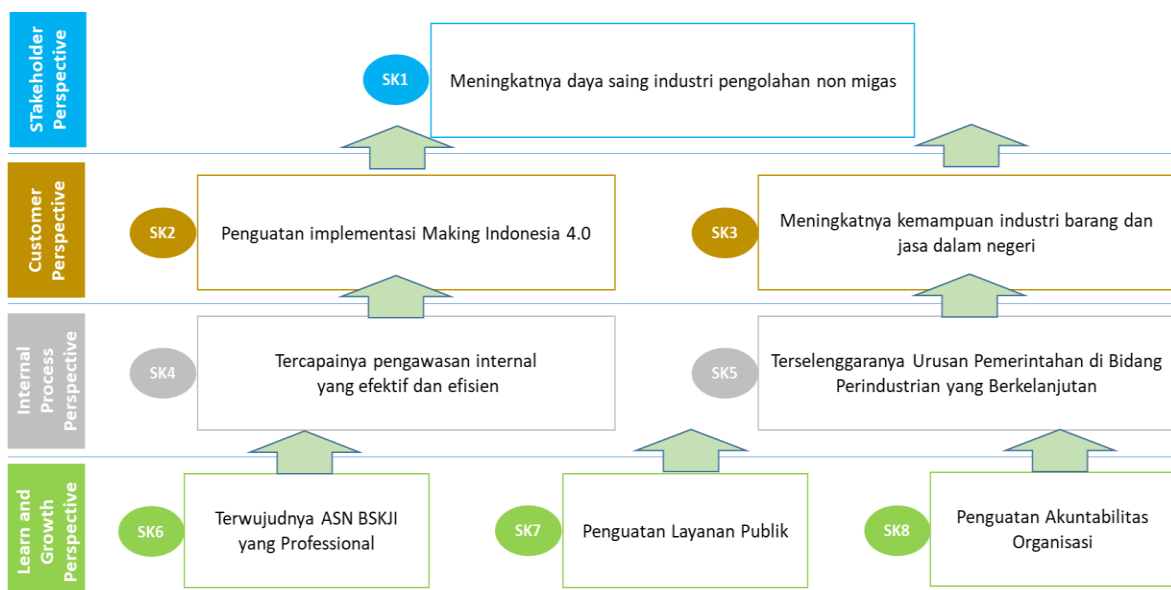
Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, BBSPJPPI melaksanakan Misi “*Peningkatan kemandirian, daya saing dan kolaborasi industri melalui pemanfaatan infrastruktur dan revitalisasi standardisasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, jasa industri dan industri hijau*”. Berkenaan dengan misi BBSPJPPI di atas, kedepannya BBSPJPPI akan berkontribusi dalam mendukung kebijakan penerapan standardisasi di sektor industri, secara mandiri maupun berkolaborasi mendorong penerapan dan pemanfaatan teknologi industri yang mendukung pada peningkatan produktivitas dan efisiensi, penerapan standar industri hijau, implementasi industri 4.0 yang kesemuanya bermuara pada peningkatan kemandirian dan daya saing industri serta pertumbuhan industri secara berkelanjutan.

Misi yang diemban BBSPJPPI dijalankan dalam mendukung pencapaian tujuan BBSPJPPI kedepannya yang juga selaras dengan pencapaian tujuan BSKJI, diantaranya 1) Meningkatkan kemampuan infrastruktur (hard dan soft) penunjang pertumbuhan industri, 2) Meningkatkan kualitas pelayanan standardisasi dan jasa industri yang berperan pada pertumbuhan industri, 3) Meningkatkan kolaborasi penunjang pertumbuhan industri dan 4) Meningkatkan good governance.

Dalam mewujudkan tujuan Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPPI) tersebut, diperlukan upaya-upaya sistematis yang dijabarkan ke dalam sasaran-sasaran strategis yang mengakomodasi Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan Perspektif Pemangku kepentingan, Perspektif Proses Internal, dan Perspektif Proses Internal, dan Perspektif Pembelajaran Organisasi.

Sasaran strategis merupakan kondisi-kondisi yang diharapkan atau kondisi-kondisi yang ingin dicapai oleh BBSPJPPI dalam rentang waktu periode 2021-2024 kedepan. Sasaran strategis ini menggambarkan cara bagaimana BBSPJPPI mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam penyusunannya, BBSPJPPI menggunakan metode cascading dengan pendekatan Balanced Score Card (BSC) berdasarkan peta strategis yang telah ditetapkan di tingkat kementerian maupun Unit Eselon I (BSKJI).

Sasaran strategis BBSPJPPI pada Perspektif Pemangku kepentingan (Stakeholders Perspective), Perspektif Pelanggan (Customer Perspective) dan Perspektif Proses Internal (Internal Process Perspective), telah ditetapkan selaras dengan sasaran strategis pada tingkat Kementerian Perindustrian dan Unit Eselon I (BSKJI). Hal ini dilakukan karena BBSPJPPI bukan merupakan *Strategic Business Unit* yang dapat berdiri sendiri. Seluruh indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab BBSPJPPI adalah turunan dari tingkat kementerian dan Unit Eselon I (BSKJI) sesuai dengan metode cascading pada BSC ditambah dengan indikator yang merupakan tugas pokok dan fungsi BBSPJPPI.



Gambar 2. Peta strategis BBSPJPPI 2021-2024

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja, maka perlu ditetapkan Indikator Kinerja untuk masing-masing sasaran strategis sebagai berikut:

A. Perspektif Pemangku Kepentingan (Stakeholders Perspective)

Sasaran strategis pada perspektif stakeholders merupakan sasaran yang ditetapkan oleh BBSPJPPI untuk memenuhi harapan para pemangku kepentingan, yakni:

1. **Sasaran Strategis ke-1 (SK1):** Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas, dengan indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran strategis ini adalah:

- 1) Peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri.

B. Perspektif Pelanggan (Customers Perspective)

Sasaran strategis pada perspektif customers merupakan sasaran yang ditetapkan oleh BBSPJPPI untuk memenuhi harapan para pelanggan, yakni:

1. **Sasaran Strategis ke-2 (SK2):** Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0, dengan indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran strategis ini adalah:
 - 1) Peningkatan peran balai dalam pengembangan industri.
2. **Sasaran Strategis ke-3 (SK3):** Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri, dengan indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran strategis ini adalah:
 - 1) Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi.
 - 2) Meningkatnya utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri.
 - 3) Peningkatan jumlah lingkup layanan jasa industri di dalam negeri.
 - 4) Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa

Pencapaian tujuan dan sasaran strategis BBSPJPPI diharapkan dapat mendukung dan mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan BSKJI. Sehubungan dengan hal tersebut, **Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) dalam perspektif pemangku kepentingan dan perspektif pelanggan** tersebut ditetapkan sebagai **Indikator Kinerja Utama (IKU)** BBSPJPPI.

C. Perspektif Proses Bisnis Internal (Internal Process Perspective)

Sasaran strategis pada perspektif internal process merupakan sasaran yang ditetapkan oleh BBSPJPI untuk memenuhi harapan pada penyelenggaraan proses internal di BBSPJPI yang menjamin tercapainya sasaran strategis pada perspektif stakeholders, yakni:

1. **Sasaran Strategis ke-4 (SK4):** Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien, dengan indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran strategis ini adalah:
 - 1) Nilai minimal indeks manajemen resiko.
 - 2) Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker.
2. **Sasaran Strategis ke-5 (SK5):** Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan, dengan indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran strategis ini adalah:
 - 1) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri.

D. Perspektif Pembelajaran Organisasi (Learning and Growth Perspective)

Sasaran strategis pada perspektif pembelajaran organisasi merupakan sasaran yang ditetapkan BBSPJPI untuk memenuhi proses pembelajaran dan pertumbuhan organisasi BBSPJPI. Capaian pada perspektif ini merupakan input yang dapat mendukung terlaksananya proses untuk menghasilkan output dan outcome BBSPJPI. Sasaran strategis yang akan dicapai yakni:

1. **Sasaran Strategis ke-6 (SK6):** Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional, dengan indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran strategis ini adalah:
 - 1) Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN.
 - 2) Nilai disiplin pegawai.
2. **Sasaran Strategis ke-7 (SK7):** Penguatan Layanan Publik, dengan indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran strategis ini adalah:
 - 1) Nilai minimal indeks layanan publik.
3. **Sasaran Strategis ke-8 (SK8):** Penguatan Akuntabilitas Organisasi, dengan indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran strategis ini adalah:
 - 1) Nilai minimal akuntabilitas kinerja.
 - 2) Nilai minimal laporan keuangan.

Keberhasilan pencapaian tujuan strategis BBSPJPI secara kuantitatif dapat ditunjukkan dengan tercapainya sasaran Strategis yang telah ditetapkan. Untuk meningkatkan visi, misi dan tujuan strategis BBSPJPI, maka sasaran strategis yang akan dicapai BBSPJPI dalam kurun waktu 2021-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

Target Kinerja BBSPJPI 2021-2024

SASARAN STRATEGIS						
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2021	2022	2023	2024
1.Meningkatnya daya saing industri pengolahan non migas	Peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri	Kolaborasi	1	1	1	1
2.Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	Peningkatan peran balai dalam pengembangan industri	Perusahaan	3	4	5	5
3. Meningkatkan kemampuan industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi	Persen	NA	10	10	10
	Meningkatnya utilitas layanan jasa industri di dalam negeri	Persen	2	2	3	4
	Peningkatan jumlah lingkup layanan jasa industri di dalam negeri	Ruang Lingkup	3	3	3	3
	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	Persen	55	58	62	65
4. Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditundaklanjuti oleh satker	Persen	91.5	92	92.5	93

SASARAN STRATEGIS						
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2021	2022	2023	2024
5. Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap jasa layanan industri	Indeks	3.6	3.6	3.6	3.6
6. Terwujudnya ASN BSKJI yang Profesional	Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	74	76	78	80
	Nilai Disiplin Pegawai	Nilai	81	82	83	85
7. Penguatan Sistem Informasi Terintegrasi, Kolaborasi dan Layanan Publik	Nilai minimal indeks layanan publik	Indeks	A-	A-	A-	A-
8. Penguatan Akuntabilitas Organisasi	Nilai minimal akuntabilitas kinerja	Nilai	80.5	81	81.5	82.5
	Nilai minimal laporan keuangan	Nilai	90	90	92	93

2.2 RENCANA KINERJA TAHUN 2022

Rencana Kinerja BBSPJPPI 2022 merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis BBSPJPPI yang merupakan perencanaan jangka menengah. Di dalam Renkin ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja tahunan, sasaran dan seluruh indikator kinerja kegiatan. Oleh karenanya, kegiatan yang akan dilaksanakan di BBSPJPPI pada Tahun Anggaran 2022 mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Renstra BBSPJPPI 2021-2024. Pelaksanaan kinerja pada setiap tahun anggaran akan berkontribusi terhadap keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran, sehingga pada akhirnya tujuan utama Renstra dan visi organisasi dapat diraih.

Rencana program kegiatan yang dilaksanakan tahun 2022 disebut sebagai Rencana Kinerja (Renkin BBSJPPI) Tahun 2022. Dalam rangka penguatan akuntabilitas untuk mewujudkan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Perindustrian maka rencana kinerja BBSJPPI 2022 telah disesuaikan dengan rencana kinerja Pemerintah, Kementerian Perindustrian dan BSKJI dengan indikator kinerja berorientasi pada hasil/capaian outcome.

Secara rinci, Renkin/RKT BBSJPPI tahun 2022 disajikan dalam bentuk matriks yang menguraikan sasaran, indikator, rencana tingkat capaian, program, uraian kegiatan, indikator (masukan, keluaran dan hasil), satuan, serta rencana tingkat capaian kegiatan sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Target Kinerja BBSJPPI 2022

No.	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja		Target	Satuan
1.	Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas	1.	Peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri	1	Kegiatan Kolaborasi
2.	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	1	Peningkatan peran balai dalam pengembangan industri	4	Perusahaan
3.	Meningkatnya kemampuan industri barang dan jasa dalam negeri	1.	Produktifitas / efisiensi perusahaan industry yang memanfaatkan teknologi industry melalui jasa konsultasi	10	Persen
		2.	Meningkatnya utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri	2	Persen
		3.	Peningkatan jumlah lingkup layanan jasa industri di dalam negeri	3	Ruang Lingkup
		4.	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	58	Persen
4.	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	1.	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	92	Persen

No.	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja		Target	Satuan
5.	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan	1.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	3,6	Indeks
6.	Terwujudnya ASN BSKJI yang Profesional	1.	Rata-rata indeks profesionalitas ASN	76	Indeks
		2.	Nilai Disiplin Pegawai	82	Nilai
7.	Penguatan Layanan Publik	1.	Nilai minimal indeks layanan publik	A-	Nilai
8.	Penguatan Akuntabilitas Organisasi	1.	Nilai minimal akuntabilitas kinerja	81	Nilai
		2.	Nilai minimal laporan keuangan	91	Nilai

2.3 RENCANA ANGGARAN

Pada tahun 2022 berdasarkan rencana kinerja yang telah disusun, BBSPJPPI berkontribusi dalam mendukung Program Kementerian Perindustrian dan BSKJI pada :

1. Program Nilai Tambah dan daya Saing Industri

Diwujudkan melalui pelaksanaan Kegiatan Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri. BBSPJPPI berbekal kompetensi inti serta dukungan sarana prasarana yang dimiliki memberikan jasa layanan teknis dalam rangka mendukung penerapan kebijakan Kementerian Perindustrian khususnya dalam rangka penerapan Standar Nasional Indonesia, standar industri hijau serta fasilitasi dalam rangka meningkatkan efisiensi, produktivitas dan daya saing industri diantaranya melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi industri di bidang pencegahan pencemaran industri.

2. Program Dukungan Manajemen

BBSPJPPI menyelenggarakan layanan dukungan pengelolaan manajemen kesekretariatan untuk lingkup internal.

Terkait dengan pelaksanaan Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri serta Program Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian, BBSPJPPI pada 2022 memperoleh alokasi pagu anggaran awal sebesar Rp. 31.694.022.000,-. Dalam perjalanannya, seiring dengan adanya kebijakan Pemerintah yang ditetapkan dalam tahun anggaran berjalan maupun perubahan kondisi dalam pelaksanaan anggaran telah dilakukan beberapa kali proses revisi anggaran sebagai berikut:

- a. Revisi ke-1 pada 15 Desember 2021, revisi terkait *Automatic Adjustment* Belanja BBSPJPPI TA. 2022. Menindaklanjuti Nota Dinas Kepala BSKJI Nomor B/641/BSKJI.1/PR/XII/2021 tanggal 7 Desember 2021 telah dilakukan pencadangan anggaran (*automatic adjustment*) pada sumber anggaran Rupiah Murni dalam DIPA BBSPJPPI TA 2022 sebagaimana ditetapkan melalui Nota Dinas Kepala BSKJI sebesar Rp. 510.597.000,-. Revisi dalam rangka pemenuhan nilai *automatic adjustment* dilakukan dengan mencantumkan beberapa pos anggaran sumber dana Rupiah Murni (RM) dalam catatan halaman IV DIPA (blokir) tanpa merubah pagu anggaran.
- b. Revisi ke-2 pada 11 Februari 2022, revisi terkait perubahan rencana penarikan dana dalam halaman III DIPA serta pergeseran rincian anggaran untuk memenuhi kebutuhan tambahan anggaran tanpa merubah pagu.
- c. Revisi ke-3 pada 4 Maret 2022, dengan pertimbangan revisi adalah revisi perubahan akibat hal-hal khusus terkait pencantuman saldo awal kas BLU tanpa merubah pagu anggaran.
- d. Revisi ke-4 pada 13 April 2022, revisi terkait perubahan rencana penarikan dana dalam halaman III DIPA serta realokasi anggaran untuk mendukung kegiatan satker dan operasional layanan tanpa merubah pagu.
- e. Revisi ke-5 pada 5 Juli 2022, revisi terkait perubahan rencana penarikan dana dalam halaman III DIPA serta pemutakhiran data hasil revisi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) tanpa merubah pagu.
- f. Revisi ke-6 pada 21 September 2022, revisi terkait pergeseran anggaran dalam rangka memenuhi alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan pengembangan dan pembinaan kepegawaian, tanpa merubah pagu.
- g. Revisi ke-7 pada 3 Oktober 2022, revisi terkait perubahan rencana penarikan dana dalam halaman III DIPA tanpa merubah pagu anggaran.
- h. Revisi ke-8 pada 13 Oktober 2022, revisi terkait penghapusan/penghematan pada blokir ~~Automatic Adjustment pada pagu belanja pegawai Satker BBSPJPPI.~~

Pagu anggaran mengalami penyesuaian berupa pengurangan pagu anggaran dari semula Rp. 31.694.022.000,- menjadi Rp. 31.204.365.000,-

- i. Revisi ke-9 pada tanggal 2 November 2022, revisi terkait pemenuhan belanja pegawai untuk pembayaran rapelan belanja pegawai yang terdampak penataan birokrasi dan pergeseran anggaran antar program untuk pemenuhan belanja operasional layanan jasa teknis.

Pagu anggaran mengalami penyesuaian berupa penambahan pagu anggaran dari semula Rp. 31.204.365.000,- menjadi Rp. 31.512.938.000,-

- j. Revisi ke-10 pada tanggal 6 Desember 2022, revisi terkait realokasi anggaran Blokir Automatic Adjustment ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.

Pagu anggaran mengalami penyesuaian berupa pengurangan pagu anggaran dari semula Rp. 31.512.938.000,- menjadi Rp. 31.491.998.000,-

- k. Revisi ke-11 pada tanggal 12 Desember 2022, revisi terkait pemutakhiran data hasil revisi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) tanpa merubah pagu anggaran.

Tabel 2.3

Rencana Anggaran Tahun 2022

OUTPUT	URAIAN	ANGGARAN (Rp. Ribu)		SD/CP
EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri			
6077	Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri	8.452.758.000		
6077.BAD	Pelayanan Publik Kepada Industri	6.952.758.000		
010	Jasa Pelayanan Teknis Pengujian BBSPJPPI	5.903.748.000		
051	Jasa Pelayanan Teknis Pengujian		5.903.748.000	
A	Koordinasi/peningkatan Layanan Dan Operasional Laboratorium Pengujian		1,669,090,000	BLU
B	Layanan Pengujian Pengendalian Pencemaran		3,268.658,000	BLU
C	Layanan Pengujian Aneka Komoditi dan Produk Halal		966,000,000	BLU
022	Jasa Pelayanan teknis Kalibrasi	11.920.000		
051	Jasa Pelayanan Teknis Kalibrasi		11.920.000	BLU
034	Jasa Pelayanan Teknis Sertifikasi BBSPJPPI	620,490,000		
051	Jasa Pelayanan Teknis Sertifikasi		620,490,000	
A	Koordinasi/Peningkatan Layanan Dan Operasional Lembaga Sertifikasi		156,730,000	BLU
B	Layanan Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu		13,600,000	BLU
C	Layanan Sertifikasi Produk		425,760,000	BLU
D	Layanan Sertifikasi Industri Hijau		11.000.000	BLU

OUTPUT	URAIAN	ANGGARAN (Rp. Ribu)		SD/CP
E	Layanan Sertifikasi Manajemen Lingkungan		13.400.000	BLU
055	Jasa Pelayanan Pelatihan Teknis BBSPJPPI	192.530.000		
<i>051</i>	<i>Jasa Pelayanan Pelatihan Teknis</i>		<i>192.530.000</i>	BLU
056	Jasa Pelayanan Inspeksi Teknis			
<i>051</i>	<i>Pelayanan Inspeksi Teknis</i>	4.200.000		
A	Layanan Audit Energi/ Audit Air/ Audit Lingkungan		4.200.000	BLU
057	Jasa Penelitian dan Pengembangan BBSPJPPI	219,870,000		
<i>051</i>	<i>Jasa Pelayanan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi</i>		<i>219,870,000</i>	BLU
6077.RAH	Sarana Bidang Industri dan Perdagangan			
013	Peralatan Fasilitas Laboratorium/workshop/layanan BBSPJPPI	1.500.000.000		
<i>051</i>	<i>Pengadaan Peralatan Fasilitas Laboratorium/workshop/layanan</i>		<i>1.500.000.000</i>	BLU
WA	Program Dukungan Manajemen			
6042	Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Penelitian dan Pengembangan Industri	23.039.240.000		
6042.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	19.772.420,000		
958	Layanan Hubungan Masyarakat	704,580,000		
<i>051</i>	<i>Pengelolaan Data dan Informasi</i>		<i>403,920,000</i>	BLU
<i>052</i>	<i>Pengelolaan Majalah/jurnal ilmiah dan Publikasi</i>		<i>43,060,000</i>	BLU
<i>054</i>	<i>Pelaksanaan Pemasaran / Promosi/Pameran/publikasi Layanan Teknis</i>		<i>257,600,000</i>	BLU
962	Layanan Umum	78,280,000		
<i>051</i>	<i>Pelayanan Tata Usaha Dan Rumah Tangga</i>		<i>78,280,000</i>	BLU
994	Layanan Perkantoran	18.989.560.000		
<i>001</i>	<i>Gaji dan Tunjangan</i>	<i>13.809.000.000</i>		RM
<i>002</i>	<i>Operasional dan Pemeliharaan Kantor</i>	<i>5.180.560.000</i>		
A	Operasional Perkantoran dan Pimpinan		2.846.461,000	BLU & RM
B	Langganan Daya Dan Jasa		777.060,000	BLU & RM
C	Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan Kantor		651,809,000	BLU & RM
D	Pemeliharaan Kendaraan Operasional		243.500,000	BLU & RM
E	Pemeliharaan Alat Laboratorium		265,000,000	BLU & RM
F	Pemeliharaan Sarana Kantor		116.680,000	BLU & RM

OUTPUT	URAIAN	ANGGARAN (Rp. Ribu)		SD/CP
G	Pengadaan Bahan Makanan Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh		199.800.000	BLU
H	Penyelenggaraan Poliklinik		62.250.000	BLU
J	Operasional IPAL		18.000.000	BLU
6042.EBB	Layanan Sarana Dan Prasarana Internal	2.388.250.000		
951	Layanan Sarana Internal	543.250.000		
<i>052</i>	<i>Pengadaan Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi</i>		<i>123.250.000</i>	BLU
<i>053</i>	<i>Pengadaan Peralatan Inventaris Perkantoran</i>		<i>420.000.000</i>	BLU
971	Layanan Prasarana Internal	1.845.000.000		
<i>051</i>	<i>Pembangunan/renovasi Gedung Dan Bangunan</i>		<i>1.845.000.000</i>	BLU
6042.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	674,910,000		
954	Layanan Manajemen SDM	338,380,000		BLU
996	Layanan Pendidikan Dan Pelatihan	336,530,000		
<i>051</i>	<i>Peningkatan Dan Pengembangan Kompetensi SDM</i>	<i>336.530,000</i>		
A	Pendidikan Dan Pelatihan Teknis ASN		54,800,000	BLU
B	Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Fungsional		24,960,000	BLU
C	Pendidikan Dan Pelatihan Teknis		256,770,000	BLU
6042.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	203.660,000		
952	Layanan Perencanaan Dan Penganggaran	33.900.000		
<i>051</i>	<i>Penyusunan Rencana Program Dan Anggaran</i>		<i>33.900.000</i>	BLU
953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	28.540.000		
<i>051</i>	<i>Pelaksanaan Pemantauan Dan Evaluasi</i>		<i>28.540.000</i>	BLU
955	Layanan Manajemen Keuangan	114.780.000		
<i>051</i>	<i>Pengelolaan Keuangan Dan Perbendaharaan</i>		<i>114.780.000</i>	BLU
961	Layanan Reformasi Kinerja	26,440,000		
<i>051</i>	<i>Pelaksanaan Reformasi Birokrasi/Zona Integritas/SPIP</i>		<i>26,440,000</i>	BLU

2.4 DOKUMEN PENJANJIAN KINERJA

Bahwa dalam rangka perwujudan pelaksanaan akuntabilitas kinerja, sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, telah dilakukan penyusunan dan penetapan dokumen Perjanjian Kinerja antara Kepala Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri dengan Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri sebagai bentuk komitmen dan kesepakatan atas kinerja yang terukur berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Penyusunan Perjanjian Kinerja BBSPJPPI Tahun 2022 berpedoman pada Renstra BBSPJPPI 2021-2024 dengan target kinerja ditetapkan sesuai target kinerja tahun berjalan yang telah ditetapkan dalam Renstra. Indikator kinerja utama pada Perkin ditetapkan indikator kinerja sasaran strategis Renstra pada perspektif pemangku kepentingan dan perspektif pelanggan sesuai Keputusan Kepala BBSPJPPI Nomor 126 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri Tahun 2021-2024.

Perjanjian Kinerja BBSPJPPI sesuai hal tersebut terdiri atas 8 sasaran strategis dan 13 indikator kinerja dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.4
Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1.	Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas	1. Peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri	1	Kegiatan Kolaborasi
2.	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	1. Peningkatan peran balai dalam pengembangan industri	4	Perusahaan
3.	Meningkatnya kemampuan industri barang dan jasa dalam negeri	1. Produktivitas /efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi	10	Persen
		2. Meningkatnya utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri	2	Persen
		3. Peningkatan jumlah lingkup layanan jasa industri di dalam negeri	3	Ruang Lingkup
		4. Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	58	Persen
4.	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	1. Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	92	Persen

No.	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja	Target	Satuan
5.	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industry	3,6	Indeks
6.	Terwujudnya ASN BSKJI yang Profesional	1. Rata-rata indeks profesionalitas ASN	76	Indeks
		2. Nilai Disiplin Pegawai	82	Nilai
7.	Penguatan Layanan Publik	1. Nilai minimal indeks layanan publik	A-	Indeks
8.	Penguatan Akuntabilitas Organisasi	1. Nilai minimal akuntabilitas kinerja	81	Nilai
		2. Nilai minimal laporan keuangan	91	Nilai

Tabel 2.5

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja BBSPJPI Tahun 2022

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi								PIC	Timeline
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV			
				Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Non Migas	Peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri	1 Kegiatan Kolaborasi	25%	Penyusunan rencana kolaborasi dengan industri	50%	Penyusunan MoU	75%	Pelaksanaan kegiatan kolaborasi	100%	Penyusunan Laporan	Januar Arif Fatkhurrahman, ST	Desember 2022
2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	Peningkatan peran balai dalam pengembangan industri	4 Perusahaan										
		1. Perencanaan design dan konsultasi pendampingan pada penerapan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) di PT Saprotan-		25%	Survey lokasi Uji karakteristik limbah Perancangan Design Engineering unit IPAL	50%	Supervisi pembangunan fisik Uji kebocoran Seeding mikroba	75%	Optimalisasi IPAL Uji coba	100%	Uji kualitas outlet Serah terima hasil pekerjaan	Farida Crisnani ngtyas, ST, M.Eng	Desember 2022

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi								PIC	Timeline	
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV				
				Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Kembang Arum												
		2. Konsultasi penyusunan dokumen standar teknis dan sistem manajemen lingkungan di RS Ken Saras		25%	Penyusunan proposal kerjasama Presentasi Penandatanganan kontrak	50%	Pendampingan sistem manajemen lingkungan Pengumpulan data	75%	Proses pengajuan pertek ke KLHK	100%	Serah terima hasil	Farida Crisnani ngtyas, ST, M.Eng	Desember 2022	
		3. Konsultasi IPAL – Penerapan Expanded Granular Sludge Bed (EGSB) untuk Integrasi Pengolahan Air Limbah Proses dan Domestik.		25%	Penandatanganan kontrak Pendampingan sistem manajemen lingkungan Pengumpulan data	50%	Pendampingan Pertek	75%	Pendampingan Pertek. Penyusunan desain IPAL	100%	Serah terima hasil	Farida Crisnani ngtyas, ST, M.Eng	Desember 2022	

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi								PIC	Timeline
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV			
				Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4. Bimbingan dan Pendampingan Teknis Industri pemahaman ISO di BP Batam			Sesuai penawaan Biaya Pendampingan dan penyusunan Dokumen ISO Nomor B/861/BSKJI/BBTPPI/MS/X/2021. Dimana pelatihan dan konsultasi dilaksanakan pada Pengenalan ISO 9001 : 2015 dilaksanakan pada 12 Maret 2022 Pengenalan ISO 19011 : 2018 dilaksanakan pada 22 Juli 2022 Pengenalan Iso 17025 : 2017 dilaksanakan pada 15, 21 dan 25 November 2022.								
		5. Bimbingan dan Pendampingan Teknis Industri Pengenalan dan pemahaman ISO 17025 : 2017 di Kawasan Industri kendal (KIK)			Pelatihan dan konsultasi pengenalan dan pemahaman ISO 17025 : 2017 sesuai penawaran B/514/BSKJI/BBSPJPI/MS/IV/2022 pada tanggal 20 April 2022. Dimana pelatihan dilaksanakan pada 16-17 November 2022.								
3	Meningkatnya Kemampuan Industri barang dan Jasa Dalam Negeri	1. Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri	10 Porsen	25%	Penyusunan dan presentasi proposal dalam rangka seleksi kegiatan DAPATI	50%	Pelaksanaan Kegiatan DAPATI: Koordinasi pelaksanaan Tim DAPATI dengan IKM terpilih	75%	Monitoring Progres Kegiatan DAPATI	100%	Penyusunan dan Proses Pelaporan	Any Kurnia ,S.Si,M. Si	Desember 2022

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN ANGGARAN 2022
BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi								PIC	Timeline	
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV				
				Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		melalui jasa konsultansi					Proses pengadaan bahan peralatan pendukung							
		2.Meningkatnya utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri	2 Persen	25%	Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPPI Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan Pemberian jasa layanan teknis ke industri dalam negeri sesuai permintaan yang disepakati	50%	Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPPI Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan Pemberian jasa layanan teknis ke industri dalam negeri sesuai permintaan yang disepakati Partisipasi pada kegiatan pameran	75%	Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPPI Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan Pemberian jasa layanan teknis ke industri dalam negeri sesuai permintaan yang disepakati Partisipasi pada kegiatan pameran	100%	Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPPI Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan teknis ke industri dalam negeri sesuai permintaan yang disepakati Evaluasi dan pelaporan	Erlin Ristiana, SE,MM	Desember 2022	
		3.Peningkatan jumlah lingkup layanan jasa industri di dalam negeri	3 Ruang Lingkup	25%	Pengajuan perluasan PRL ke KAN	50%	Mempersiapkan data verifikasi dan validasi	100%	Pelaksanaan akreditasi oleh KAN dan perbaikan temuan			Ani Kurnia, S.Si,M. Si	Desember 2022	

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN ANGGARAN 2022
BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi								PIC	Timeline
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV			
				Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4.Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	58 Persen	25%	Identifikasi kebutuhan dan penyusunan spesifikasi pengadaan Identifikasi potensi TKDN pada proses pengadaan B&J Penyusunan rencana pengadaan dan pengisian SIRUP Pengajuan persetujuan Menperin untuk pengadaan B&J yg berasal dari impor	50%	proses pengadaan	75%	Serah terima dan penyelesaian administrasi pembayaran	100%	pelaporan	Pejabat pengadaan, PPK BLU	Desember 2022
4	Tercapainya Pengawasan Internal Yang Efektif dan Efisien	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	92 Persen	15%	Koordinasi penyusunan dan penyiapan laporan pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya	50%	Koordinasi jadwal pelaksanaan audit kinerja dengan Inspektorat III Koordinasi penyiapan dokumen kelengkapan pelaksanaan audit kinerja Koordinasi pelaksanaan audit kinerja dengan Tim Itjen	85%	Koordinasi penyiapan dan penyampaian dokumen tindak lanjut hasil pengawasan Koordinasi dengan Tim Itjen untuk pelaksanaan monitoring tindak lanjut	100%	Koordinasi dengan Setitjen untuk memonitoring penerbitan surat penyelesaian hasil pengawasan	Kabag TU , ketua tim Program	Desember 2022

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi								PIC	Timeline
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV			
				Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Penyusunan dan penyampaian rencana aksi tindak lanjut hasil pengawasan		hasil pengawasan				
5	Terselenggaranya Urusan pemerintahan di Bidang Perindustrian Yang Berkelanjutan	Indeks kepuasan Masyarakat	3,6	25%	Penanganan dan pemantauan komplain/keluhan pelanggan Penyebaran kuesioner kepuasan pelanggan Evaluasi dan penghitungan statistisi penilaian IKM, dengan target capaian IKM 3,6	50%	Penanganan dan pemantauan komplain/keluhan pelanggan Penyebaran kuesioner kepuasan pelanggan Evaluasi dan penghitungan statistisi penilaian IKM, dengan target capaian IKM 3,6 Edukasi jasa layanan balai ke pelanggan melalui Business Gathering Supervisi ke pelanggan	75%	Penanganan dan pemantauan komplain/keluhan pelanggan Penyebaran kuesioner kepuasan pelanggan Evaluasi dan penghitungan statistisi penilaian IKM, dengan target capaian IKM 3,6 Evaluasi dan tindak lanjut kuesioner IKM (evaluasi intern) Supervisi ke pelanggan	100%	Penanganan dan pemantauan komplain/keluhan pelanggan' Evaluasi hasil kuesioner Evaluasi akhir dan pelaporan	Erlin Ristiana, SE,MM	Desember 2022

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN ANGGARAN 2022
BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi								PIC	Timeline
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV			
				Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	Terwujudnya ASN BSKJI yang profesional	1. Rata-rata indeks profesionalitas ASN	76 Indeks	25%	Koordinasi dan menyusun rencana diklat teknis 20 JPL dan workshop/Bimtek/Seminar/webinar sesuai kompetensi untuk seluruh pegawai	50%	Fasilitasi dan monitoring realisasi diklat 20 JPL dan workshop/Bimtek/Seminar/Webinar	75%	Fasilitasi monitoring realisasi diklat 20 JPL dan workshop/Bimtek/Seminar/Webinar	100%	Fasilitasi dan monitoring realisasi diklat 20 JPL dan workshop/Bimtek/Seminar/Webinar	Kabag TU, Tim kerja umum dan kepegawaian	Desember 2022
		2. Nilai Disiplin Pegawai	82 Nilai	25%	Mengingatkan setiap pegawai untuk log in pada jam masuk dan log out pada jam pulang di intranet setiap hari kerja. Evaluasi bulanan capaian nilai disiplin satker	50%	Mengingatkan setiap pegawai untuk log in pada jam masuk dan log out pada jam pulang di intranet setiap hari kerja. Evaluasi bulanan capaian nilai disiplin satker	75%	Mengingatkan setiap pegawai untuk log in pada jam masuk dan log out pada jam pulang di intranet setiap hari kerja. Evaluasi bulanan capaian nilai disiplin satker	100%	Mengingatkan setiap pegawai untuk log in pada jam masuk dan log out pada jam pulang di intranet setiap hari kerja. Evaluasi bulanan capaian nilai disiplin satker Koordinasi dengan Koordinator fungsi kepegawaian BSKJI terkait capaian nilai	Kabag TU, Tim kerja umum dan kepegawaian	Desember 2022

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
 TAHUN ANGGARAN 2022
 BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi								PIC	Timeline
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV			
				Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											disiplin satker BBSPJPI		

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi								PIC	Timeline
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV			
				Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	Penguatan Layanan Publik	Nilai Minimal indeks layanan publik	A-	20%	Rencana :1. Penyusunan draft SK Standar Pelayanan Publik dan PPID 2. Perencanaan pengembangan/pe mutakhiran SINDIi. 3. Update website secara berkala 4. Pemutakhiran sistim informasi digital terintegrasi secara berkala 5. Penyebaran informasi optimalisasi pelayanan pencegahan pencemaran industri melalui media Kemenperin (Press release Adaptive Monitoring System (AiMS)	50%	Pengembangan/pe mutakhiran SINDIi. Update website secara berkala Pemutakhiran sistim informasi digital terintegrasi secara berkala memuat informasi yg mudah diakses oleh masyarakat tanpa gangguan Informasi layanan publik tersaji pada desk layanan public, website dan medsos. Informasi layanan melalui OASIS, BG	75	Pemutakhiran sistim informasi digital secara berkala memuat informasi yg mudah diakses oleh masyarakat tanpa gangguan Informasi layanan publik tersaji pada desk layanan public, website dan medsos Informasi dan promosi layanan melalui OASIS, BG	100%	Informasi dan promosi layanan melalui OASIS, BG. Informasi layanan publik tersaji dan terlaksana sesuai standar. Standar pelayanan telah sesuai dengan perundangan yang berlaku, terdokumentasi, terpublikasi dan mudah diakses	Erlin Ristiana, SE,MM	Desember 2022

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN ANGGARAN 2022
BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi								PIC	Timeline
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV			
				Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	Penguatan Akuntabilitas Organisasi	1.Nilai minimal akuntabilitas kinerja	81	30%	Penyusunan dokumen Tapkin Penyusunan dokumen Renkin Pelaksanaan monev kinerja dan penyusunan dokumen akuntabilitas kinerja tahun berjalan (PP 39 Tw I) Penyiapan data dukung penilaian SAKIP sesuai Permenpan RB 88/2021	60%	Pelaksanaan monev kinerja dan penyusunan dokumen akuntabilitas kinerja tahun berjalan (PP 39 Tw II) Koordinasi pelaksanaan penilaian SAKIP dengan Ses BSKJI dan Tim Itjen Penyiapan dokumen tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi SAKIP	80%	Pelaksanaan monev kinerja dan penyusunan dokumen akuntabilitas kinerja tahun berjalan (PP 39 Tw III) Penyiapan dokumen tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi SAKIP	100%	Pelaksanaan monev kinerja dan penyusunan dokumen akuntabilitas kinerja tahun berjalan (PP 39 Tw IV dan LAKIP)	Kabag TU, Tim kerja pelaporan	Desember 2022
		2.Nilai minimal laporan keuangan	91	35%	Penyusunan laporan keuangan anaudited untuk pelaporan periode tahun sebelumnya Koordinasi penyusunan laporan keuangan anaudited dengan bagian keuangan Ses BSKJI Pelaksanaan Audit laporan Keuangan anaudited oleh KAP	60%	Penyusunan laporan keuangan Semester I periode tahun berjalan Pelaksanaan penilaian laporan keuangan audited periode tahun sebelumnya oleh Biro Keuangan Koordinasi penyusunan laporan keuangan Semester I	80%	Penyusunan laporan keuangan Triwulan III periode tahun berjalan	100%	Penyusunan laporan keuangan Semester II periode tahun berjalan Koordinasi penyusunan laporan keuangan Semester II periode tahun berjalan	Kabag TU, Tim kerja keuangan	Desember 2022

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi								PIC	Timeline	
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV				
				Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
					Review laporan keuangan oleh Irjen		periode tahun berjalan dengan bagian keuangan Ses BSKJI Review laporan keuangan Semester I periode tahun berjalan oleh Itjen					dengan bagian keuangan Ses BSKJI Review laporan keuangan Semester II periode tahun berjalan oleh Itjen Koordinasi persiapan pengadaan untuk penunjukan KAP		

BAB. III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja merupakan pengukuran keberhasilan maupun kegagalan dari suatu rencana kinerja yang telah ditetapkan. Pada bab ini, menjelaskan target dan realisasi dari Perjanjian Kinerja TA. 2022 dan capaian dari kegiatan lainnya yang dianggap penting untuk menginformasikan ukuran keberhasilan tujuan dan sasaran strategis organisasi. Selain itu, juga memaparkan Capaian Kinerja Satker Berdasarkan Renstra BSKJI Tahun 2021-2024. Uraian di bawah merupakan realisasi kinerja BBSPJPPI pada tahun 2022 yang disajikan berdasarkan sumber dana dari Rupiah Murni (RM) dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

3.1. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Dalam mencapai visi dan misinya, BBSPJPPI melaksanakan kegiatan yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) BSKJI dan Renstra BBSPJPPI dengan target kinerja pada setiap awal tahun anggaran ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Pada tahun 2022, BBSPJPPI melaksanakan kegiatan Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri dan kegiatan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri guna mendukung perwujudan 8 (delapan) Sasaran Strategis yang telah ditetapkan BSKJI yang meliputi :

- 1 Sasaran Strategis I : Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas
- 2 Sasaran Strategis II : Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0
- 3 Sasaran Strategis III: Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri
- 4 Sasaran Strategis IV: Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien
- 5 Sasaran Strategis V : Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan
- 6 Sasaran Strategis VI: Terwujudnya ASN BSKJI yang Profesional
- 7 Sasaran Strategis VII: Penguatan Layanan Publik
- 8 Sasaran Strategis VIII: Penguatan Akuntabilitas Organisasi

Sasaran strategis BBSPJPPI telah ditetapkan selaras dengan sasaran strategis pada tingkat Kementerian Perindustrian dan Unit Eselon I (BSKJI) dimana seluruh indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab BBSPJPPI adalah turunan dari tingkat kementerian dan Unit Eselon I (BSKJI). Hal ini dapat terlihat sesuai pemetaan sasaran

strategis dan indikator kinerja berdasarkan pemetaan/matriks alur sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 3.1

Matriks Alur IKU Kemenperin, BSKJI Sampai Perjanjian Kinerja Balai TA.2022

KEMENPERIN			BSKJI			BBSJPPI		
KO DE	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KO DE	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KO DE	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)								
SS 1.	Meningkatnya daya saing dan kemandirian industri pengolahan nonmigas	Efisiensi sumber daya industri dalam rangka peningkatan daya saing industri hijau	SP 1.	Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas	Efisiensi sumber daya industri dalam rangka peningkatan daya saing industri hijau	SK 1	Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas	Peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri
SS 2.1	Penguatan implementasi Making Indonesia 4.0	Perusahaan dengan nilai Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) >3.0	SP 2.	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang telah dilaksanakan pembimbingan dan pendampingan industri 4.0	SK 2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	Peningkatan peran balai dalam pengembangan industri
SS 3.1	Meningkatnya kemampuan industri dalam negeri	Jumlah SNI bidang industri yang diterapkan dan diberlakukan.	SP 3.	Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	SNI bidang industri yang diterapkan dan diberlakukan.	SK 3	Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultansi
		Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultansi			Tingkat Kepatuhan LPK terhadap regulasi			Meningkatnya utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri
		Persentase nilai capaian			Produktivitas/efisiensi perusahaan			Peningkatan jumlah lingkup layanan jasa

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN ANGGARAN 2022
BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA PENCEGAHAN PENCEMARAN
INDUSTRI**

KEMENPERIN			BSKJI			BBSJPPI		
KO DE	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KO DE	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KO DE	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
		penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan BSKJI			industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi			industri di dalam negeri
					Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan BSKJI			Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa
NON INDIKATOR KINERJA UTAMA (NON IKU)								
SS 8	Terselenggara Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdayasaing dan Berkelanjutan	Perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH)	SP 5.	Terselenggara urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang berkelanjutan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	SK 5	Terselenggara Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri
SS 9	Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	SP 6.	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	SK 4	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker
SS 10	Terwujudnya ASN yang Profesional dan Berkepribadian	Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN Kemenperin	SP.	Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional	Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN	SK 6	Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional	Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN
					Nilai disiplin pegawai			Nilai disiplin pegawai

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN ANGGARAN 2022
BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA PENCEGAHAN PENCEMARAN
INDUSTRI**

KEMENPERIN			BSKJI			BBSJPPI		
KO DE	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KO DE	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KO DE	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
SS 11	Terwujudnya Sistem Informasi Industri yang Berkualitas	Data dan informasi sesuai dengan kebutuhan pengambil keputusan	SP 8.	Penguatan Sistem Informasi Terintegrasi, Kolaborasi dan Layanan Publik	Satker yang memperoleh Indeks layanan publik minimal B	SK 7	Penguatan Layanan Publik	Nilai minimal indeks layanan publik
SS 12	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Tingkat akuntabilitas laporan keuangan dan BMN	SP 9.	Penguatan Akuntabilitas Organisasi	Satker yang memperoleh nilai laporan keuangan minimal 90	SK 8	Penguatan Akuntabilitas Organisasi	Nilai minimal laporan keuangan
SS 13	Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian	SP 9.	Penguatan Akuntabilitas Organisasi	Satker yang memperoleh nilai akuntabilitas kinerja minimal A	SK 8	Penguatan Akuntabilitas Organisasi	Nilai minimal akuntabilitas kinerja

Seperti yang telah diungkapkan dalam Bab II, Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi dalam pelaksanaannya, setiap triwulan dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian tersebut melalui laporan triwulan, e-monitoring, dan ALKI. Adapun realisasi fisik dari capaian atas Rencana Aksi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Capaian Rencana Aksi TA. 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Realisasi	
					Sd Triwulan IV	
					Target fisik (%)	Kegiatan
1	Meningkatnya daya saing industri pengolahan non migas	Peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri	1 Kolaborasi	1 Kolaborasi	100	Pelaksanaan koordinasi dengan PT. Pupuk Kujang mulai dari proses penyusunan MoU sampai pelaksanaan kolaborasi Pengujian dan Penyusunan Laporan Relative Accuracy Test Audit (RATA Test) untuk mendukung sistem pemantauan emisi secara terus menerus (Continuous Emission Monitoring System).
2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	Peningkatan peran balai dalam pengembangan industri	4 Perusahaan	5 Perusahaan	100	Pelaksanaan dan penyelesaian Kerjasama BBSPJPPI sesuai SPK Kerjasama untuk peningkatan peran Balai dalam pengembangan industri terkait dengan: 1) Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi dengan PT Retota Sakti, RS Ken Saras, CV Saprotan, dan 2) Implementasi Mutu/Standar dengan PT. Kawasan Industri Kendal dan BP Batam.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Realisasi	
					Sd Triwulan IV	
					Target fisik (%)	Kegiatan
3	Meningkatnya kemampuan industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	1. Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultansi	10 Persen	18,38 Persen	100	<ul style="list-style-type: none"> Telah dilakukan pengajuan proposal dan seleksi untuk kegiatan DAPATI TA 2022, dimana BBSPJPPI mendapat persetujuan untuk 4 kegiatan DAPATI. Proses pendampingan untuk mendukung peningkatan produktivitas/efisiensi pada 4 IKM terpilih Perhitungan peningkatan produktivitas/efisiensi rata-rata pada perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultansi DAPATI.
		2. Meningkatnya utilitas layanan jasa industri di dalam negeri	2 Persen	41,37 Persen	100	<ul style="list-style-type: none"> Promosi jasa layanan BBSPJPPI baik secara offline (pelaksanaan Business Gathering) maupun online dengan memanfaatkan media sosial balai. Pemberian jasa layanan ke industri

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Realisasi	
					Sd Triwulan IV	
					Target fisik (%)	Kegiatan
						sesuai permintaan yang disepakati. <ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan keuangan dan pencatatan penerimaan PNBPN untuk setiap jasa layanan pada TA 2022
		3.Peningkatan jumlah lingkup layanan jasa industri di dalam negeri	3 Ruang Lingkup	4 Ruang Lingkup	100	<ul style="list-style-type: none"> • Telah dilakukan pengajuan perluasan ruang lingkup akreditasi untuk laboratorium kalibrasi • Pelaksanaan Assesmen KAN untuk Reakreditasi laboratorium kalibrasi dan pengajuan perluasan ruang lingkup untuk lingkup kalibrasi alat gas analyser-CO, gas analyser-NO, gas analyser-SO2 dan thermometer digital
		3.Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	58 Persen	88,11 Persen	100	<ul style="list-style-type: none"> • Telah dilakukan pengisian aplikasi P3DN untuk rencana pengadaan B/J pada satker BBSPJPPI tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Realisasi	
					Sd Triwulan IV	
					Target fisik (%)	Kegiatan
						<ul style="list-style-type: none"> • Telah dilakukan pengajuan persetujuan tertulis kepada Menperin untuk pengadaan barang/jasa yang dipenuhi dari impor atau TKDN di bawah 25% • Bagian keuangan BBSPJPPI telah melakukan tagging realisasi TKDN (PDN, TKDN, Non PDN) atas realisasi belanja pada aplikasi e-Mon APBN • Pencatatan penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa pada akun terpilih (521211 ; 521219; 521811; 522192; 524114; 521111 ; 521131; 522141; 524119; 522131; 522191; 521241; 521841; 532111; 533111)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Realisasi	
					Sd Triwulan IV	
					Target fisik (%)	Kegiatan
4	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditundaklanjuti oleh satker	92 Persen	100 Persen	100	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan audit kinerja dalam rangka pengawasan internal pada unit kerja BBSPJPPI oleh Tim Inspektorat III Kementerian Perindustrian • Penyusunan dan penyampaian Rencana Aksi tindak lanjut hasil pengawasan • Penyampaian dokumen bukti tindak lanjut hasil pengawasan. • Penerbitan surat penyelesaian hasil audit kinerja oleh Itjen.
5	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap jasa layanan industri	3,6	3,66	100	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan survey kepuasan pelanggan TA 2022. • Evaluasi atas hasil kuesioner kepuasan pelanggan.
6	Terwujudnya ASN BSKJI yang Profesional	1.Rata-rata indeks profesionalitas ASN	76	77,07	100	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi dan monitoring realisasi diklat 20 JPL dan workshop/Bimtek/Seminar/Webinar. • Penginputan informasi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Realisasi	
					Sd Triwulan IV	
					Target fisik (%)	Kegiatan
						peningkatan kompetensi ASN pada aplikasi My SAPK.
		2.Nilai Disiplin pegawai	82	83,10	100	<ul style="list-style-type: none"> Mengingatkan setiap pegawai untuk log in pada jam masuk dan log out pada jam pulang di intranet (setiap jam kerja). Evaluasi bulanan terhadap capaian nilai disiplin satker.
7	Penguatan Layanan Publik	Nilai minimal indeks layanan publik	A-	A	100	<ul style="list-style-type: none"> Tersedia dan terselenggaranya Standar Pelayanan (SP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemutakhiran/update sistem informasi digital secara berkala memuat proses bisnis, informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Informasi layanan publik tersaji pada desk layanan publik, website dan medsos. Terselenggaranya Informasi dan promosi layanan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Realisasi	
					Sd Triwulan IV	
					Target fisik (%)	Kegiatan
						<p>BBSJPPI melalui OASIS , BG dan FGD.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Update Standar pelayanan dan pengelolaan informasi public (SK, Baner/leaflet, websit dan Sistim Informasi). • Fast respon terhadap complain/keluhan pelanggan/saran dan masukan.
8	Penguatan Akuntabilitas Organisasi	1.Nilai minimal akuntabilitas kinerja	81	81,65	100	<ul style="list-style-type: none"> • Penyiapan data dukung penilaian SAKIP tahun 2021 sesuai Permenpan RB 88/2021 • Penilaian evaluasi SAKIP tahun 2021 oleh Tim Inspektorat III Kementerian Perindustrian • Penyiapan dokumen tindak lanjut rekomendasi hasil penilaian SAKIP tahun 2021 • Penyusunan dokumen akuntabilitas kinerja tahun berjalan (PP 39 Triwulan I,II,III,IV dan LAKIP 2022)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Realisasi	
					Sd Triwulan IV	
					Target fisik (%)	Kegiatan
		2.Nilai minimal laporan keuangan	91	97	100	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan audit laporan keuangan tahun 2021 oleh Kantor Akuntan Publik. • Penilaian Laporan Keuangan BBSJPPI TA 2021 oleh Biro Keuangan • Penyusunan Laporan Keuangan tahun 2022. • Pelaksanaan Review Laporan Keuangan tahun 2022 oleh Inspektorat III Kemenperin

Dari tabel di atas, sebagian besar indikator kinerja telah mencapai target yang ditetapkan per Triwulan, namun terdapat beberapa indikator yang realisasinya tidak mencapai target adalah rata-rata indeks profesionalitas ASN.

Penjelasan yang lebih lengkap akan diuraikan pada capaian per indikator. Diharapkan pada tahun selanjutnya, capaian kinerja dapat mencapai target yang telah ditetapkan sebagai bahan untuk tindak lanjut, evaluasi dan perbaikan dalam pelaksanaan program/kegiatan.

Adapun penjelasan hasil capaian kinerja yang telah dilaksanakan dari masing-masing Sasaran Strategis tersebut sebagai berikut :

3.1.1 Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja TA 2022

I. Sasaran Strategis I : Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Non Migas

a Indikator Kinerja : Peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri

Pejabat Fungsional Pembina Industri di setiap balai harus memiliki penguasaan teknologi industri yang meliputi aspek pemetaan, pemilihan, pelaksanaan pengadaan, pemanfaatan, penjaminan risiko, optimalisasi dan audit. Agar tercapai penguasaan yang lebih efektif, diperlukan adanya kolaborasi dengan berbagai pihak yang meliputi akademisi, lembaga penelitian, ataupun instansi lainnya. Hasil kolaborasi dapat berbentuk kajian dalam bentuk model konseptual, spesifikasi, rancangan, atau prototype. Bukti pelaksanaan kolaborasi berupa SPK /bukti lain yang mencerminkan peningkatan kapabilitas dengan basis kolaborasi pada tahun ketika pengukuran dilakukan

a. Hasil yang telah dicapai

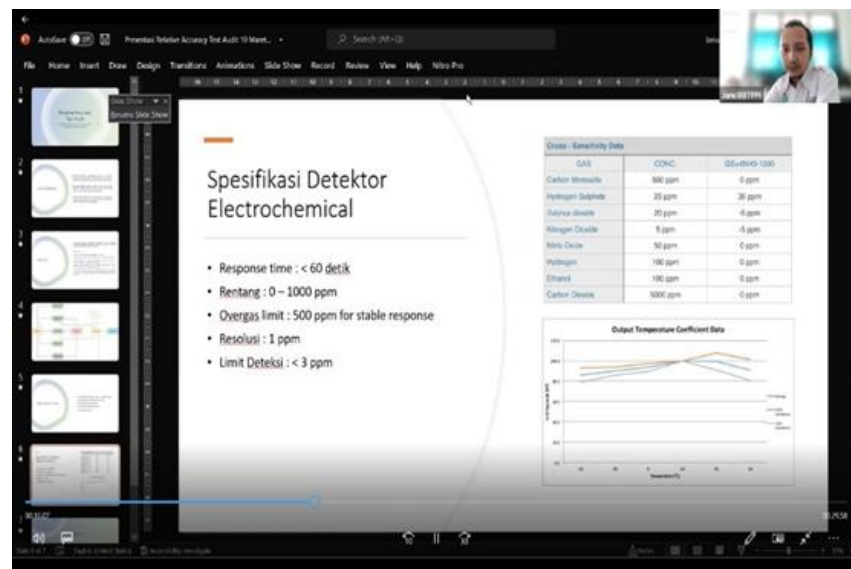
Kerjasama BBSPJPPI dengan PT. Pupuk Kujang berjudul Konsultasi Pengujian dan Penyusunan Laporan Relative Accuracy Test Audit (RATA) tertuang dalam SPK Nomor B/133/BSKJI/BBSPJPPI/SPK/VI/2022 tanggal 6 Juni 2022.

Sesuai ketentuan Permen LHK Nomor 13 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi Pemantauan Emisi Industri Secara Terus Menerus, setiap usaha dan/atau kegiatan yang diwajibkan melakukan pemantauan Emisi menggunakan Sistem Pemantauan Emisi Secara Terus Menerus (Continuous Emission Monitoring System), wajib mengintegrasikan pemantauan Emisinya ke dalam Sistem Informasi Pemantauan Emisi Industri (SISPEK).

Peralatan CEMS yang terkoneksi ke SISPEK perlu diaudit salah satunya dengan menggunakan metode Relative Accuracy Test Audit (RATA) (perbedaan rata-rata absolut antara konsentrasi gas dengan peralatan pemantauan secara terus menerus dan nilai yang ditentukan dengan Metode Referensi sebagaimana dalam Environmental Protection Agency/EPA).

BBSPJPPI yang memiliki teknologi Adaptive Monitoring System (AiMS) yang salah satunya dapat diterapkan untuk proses pemantauan emisi secara

terus menerus, sementara PT. Pupuk Kujang yang bergerak di industri pupuk yang dalam unit produksinya memiliki unit Prilling Tower sebagai sumber emisi termasuk dalam sektor yang diwajibkan melakukan pemantauan Emisi menggunakan Sistem Pemantauan Emisi Secara Terus Menerus bersepakat untuk saling berkolaborasi dalam pelaksanaan proses audit RATA untuk peralatan AiMS yang dimiliki BBSPJPI agar peralatan AiMS yang dimiliki BBSPJPI dapat diterapkan untuk proses pemantauan emisi pada unit Priling Tower PT. Pupuk Kujang.



Gambar 3. Koordinasi pelaksanaan kolaborasi Uji RATA dengan PT. Pupuk Kujang

b. Analisis hasil yang telah dicapai

Dari indikator kinerja peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri, hasil yang didapat sesuai dengan target 1 (satu) kegiatan kolaborasi dengan realisasi 1 (satu) kegiatan kolaborasi (100 % dari target).

Tabel 3.3. Target dan capaian indikator kinerja

Indikator Kinerja	Target	Capaian	% Capaian
Peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri.	1 Kolaborasi	1 Kolaborasi	100

Analisis Penyebab Keberhasilan :

Indikator kinerja peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri berhasil dilaksanakan dikarenakan inovasi teknologi yang dimiliki BBSPJPI berupa AiMS (*Adaptive Monitoring System*) untuk pemantauan emisi secara real time dapat diterapkan dalam menunjang kebutuhan industri dalam memenuhi regulasi Permen LHK Nomor 13 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi Pemantauan Emisi Industri Secara Terus Menerus yang mewajibkan setiap usaha dan/atau kegiatan melakukan pemantauan Emisi menggunakan Sistem Pemantauan Emisi Secara Terus Menerus (*Continuous Emission Monitoring System*), serta wajib mengintegrasikan pemantauan Emisinya ke dalam Sistem Informasi Pemantauan Emisi Industri (SISPEK).

Inovasi AiMS (*Adaptive Monitoring System*) terintegrasi dalam Sistem Informasi Digital sebagai teknologi Monitoring Lingkungan berbasis Daring “ sendiri pada tahun 2021 terpilih sebagai salah satu dari 112 Karya Inovasi Indonesia Paling Prospektif-2020 dari BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional).

Tabel 3.4. Perbandingan realisasi Indikator Kinerja Peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri dalam Renstra 2021-2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Indikasi Capaian					
			2021		2022		Total	
			T	R	T	R	T	R
Meningkatnya daya saing Industri Pengolahan Nonmigas	Peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri	Kolaborasi	1	2	1	1	2	3

Dari Tabel 3.4 untuk Indikator Kinerja Peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri , realisasi dibandingkan Tahun 2021 mengalami penurunan. Di Tahun 2021 realisasi 2 kolaborasi sedangkan di Tahun 2022 sebanyak 1 kolaborasi.

Tetapi dilihat dari total realisasi 2021-2022 dibandingkan dengan total target 2021-2022 maka meningkat. Total realisasi 3 kolaborasi sedangkan total target 2 kolaborasi.

c. Kendala

Pada pelaksanaan kegiatan kolaborasi dihadapi kendala terkait pelaksanaan identifikasi dan uji coba lapangan ke lokasi pekerjaan yang belum dapat dilakukan. Hal ini dikarenakan cerobong di PT. Pupuk Kujang belum memenuhi persyaratan untuk uji RATA sehingga perlu dilakukan perbaikan cerobong terlebih dahulu. Berdasarkan koordinasi dengan PT. Pupuk Kujang, tindak lanjut pelaksanaan kolaborasi dalam pelaksanaan uji RATA akan dilanjutkan kembali pada periode tahun 2023.

d. Rekomendasi

Perbaikan untuk TA selanjutnya adalah perlu dilakukan monitoring progres pelaksanaan kegiatan agar output kerjasama dapat benar-benar tercapai di tahun 2023 sesuai dengan timeline yang telah disepakati tetap memonitor dan memberikan pendampingan konsultasi terkait kerjasama kolaborasi tersebut.

II. Sasaran Strategis II : Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0 .

a) Peningkatan peran balai dalam pengembangan industri

Pemanfaatan teknologi dan implementasi mutu/standar merupakan salah satu usaha yang dapat dilakukan oleh perusahaan industri untuk meningkatkan kemampuan industri. Namun dapat dipahami bahwa tidak semua perusahaan industri mempunyai kompetensi untuk mengkaji penerapan teknologi yang tepat untuk permasalahan yang dihadapi khususnya di era industri 4.0. Dalam hal ini, perusahaan industri dapat bekerja sama dengan balai-balai sebagai penyedia layanan jasa industri.

Kegiatan peningkatan peran balai ini dapat berupa asesmen, pelatihan, pendampingan, konsultasi, bimbingan transformasi industri 4.0, dan pendampingan, konsultasi, bimbingan penerapan standardisasi industri (standar mutu, standar berkelanjutan, standar industri hijau)

a. Hasil yang telah dicapai

Pada tahun 2022, terkait dengan peran balai dalam mendukung pengembangan industri BBSPJPPI telah melakukan pendampingan teknis dan konsultasi terkait :

I. Pemanfaatan Teknologi, diantaranya:

- a) PT. Retota Sakti (ind. Kerajinan Tekstil). Konsultasi IPAL - Penerapan Expanded Granular Sludge Bed (EGSB) untuk Integrasi Pengolahan Air Limbah Proses dan Domestik sesuai SPK Nomor T/9/BSKJI/BBTPPI/SPK/I/2022 tanggal 10 Januari 2022
- b) RS. Ken Saras (Pelayanan Jasa Kesehatan -Rumah Sakit). Konsultasi Penyusunan Dokumen Standar Teknis dan Sistem Manajemen Lingkungan sesuai SPK Nomor B/16/BSKJI/BBTPPI/HK-SPK/I/2022 tanggal 21 Januari 2022.
- c) CV. Saprotan Utama (Industri Kimia -Pupuk dan Pestisida). Konsultasi Desain IPAL Domestik sesuai SPK Nomor T/27/BSKJI/BBTPPI/HK-SPK/II/2022 tanggal 7 Februari 2022

II. Implementasi Mutu/Standar

- a) PT. Kawasan Industri Kendal (KIK)
Pelatihan dan pendampingan SDM di laboratorium sesuai ISO 17025:2017 sesuai SPK Nomor T/280/BSKJI/BBTPPI/SPK/IX/2022 tanggal 20 Oktober 2022
- b) BP Batam
Pendampingan Penyusunan Dokumen Sistem Manajemen Mutu berdasar ISO 9001:2015 dan penerapannya, Konsultasi dan set-up dokumen penambahan ruang lingkup laboratorium berdasarkan ISO 17025:2017 sesuai persetujuan penawaran Nomor B/1089/BSKJI/BBSPJPPI/MS/IX/2022 tanggal 2 September 2022

b. Analisis Hasil yang telah dicapai :

Dari indikator kinerja peningkatan peran balai dalam pengembangan industri, hasil yang didapat lebih tinggi dengan target 4 (empat) perusahaan dengan realisasi 5 (lima) perusahaan (125 % dari target).

Tabel 3.5. Target dan capaian indikator Peningkatan Peran Balai dalam Pengembangan Industri

Indikator Kinerja	Target	Capaian	% Capaian
Peningkatan peran balai dalam pengembangan industri	4 Perusahaan	5 Perusahaan	125

Analisis Penyebab keberhasilan :

- Kompetensi BBSPJPPI dalam penanganan pencemaran khususnya terkait pengolahan air limbah telah teruji dan terbukti dapat memecahkan permasalahan industri sehingga akan memunculkan kepercayaan dari pelanggan industri.
- BBSPJPPI mempunyai SDM yang berkompeten dan memiliki pengalaman dalam penerapan sistem manajemen mutu baik ISO 9001 dan ISO 17025.

Tabel 3.6. Capaian Indikator Peningkatan peran balai dalam pengembangan industri dibandingkan dengan Renstra 2021-2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian					
			2021		2022		Total	
			T	R	T	R	T	R
Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	Peningkatan peran balai dalam pengembangan industri	Perusahaan	3	7	4	5	7	12

Dari tabel 3.6, didapat bahwa capaian indikator kinerja peningkatan peran balai dalam pengembangan industri mengalami penurunan dari Tahun 2021. Pada Tahun 2021 capainya 7 perusahaan sedangkan Tahun 2022 sebanyak 5 perusahaan.

c. Kendala

Tidak ada kendala dalam pencapaian target

d. Rekomendasi

Untuk lebih meningkatkan realisasi layanan bimbingan teknis dan konsultasi ke sektor industri dalam mendukung peranan BBSPJPPI dalam

mendukung pengembangan industri khususnya terkait optimalisasi pemanfaatan teknologi dan implementasi mutu/standar industri, kedepannya agar dapat lebih meningkatkan upaya promosi/publikasi atas kemampuan pemberian jasa layanan BBSPJPPI. Pelaksanaan bimbingan teknis juga dapat memanfaatkan sistem informasi e-Training yang telah dimiliki BBSPJPPI sehingga diharapkan dapat lebih banyak menjangkau pelanggan karena pelaksanaan bimtek dapat dilakukan secara online dari lokasi pelanggan.

III. Sasaran Strategis III : Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri

Sasaran strategis ini mempunyai 4 indikator kinerja yaitu :

1. Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi.

Pemanfaatan teknologi merupakan salah satu usaha yang dapat dilakukan oleh perusahaan industri untuk meningkatkan kemampuan industri. Namun dapat dipahami bahwa tidak semua perusahaan industri mempunyai kompetensi untuk mengkaji penerapan teknologi yang tepat untuk permasalahan yang dihadapi. Dalam hal ini, perusahaan industri dapat bekerjasama dengan perusahaan penyedia jasa konsultasi. Penyedia jasa melakukan kajian untuk memilih, merancang penerapan, mengimplementasikan dan mengevaluasi teknologi industri sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan industri. Keberhasilan kerjasama jasa konsultasi diukur dari seberapa besar peningkatan.

Produktivitas /efisiensi yang didapatkan setelah penerapan teknologi hasil konsultasi dibandingkan dengan kondisi sebelum penerapan. Sumber datanya dari laporan pelaksanaan jasa konsultasi DAPATI (Dana Kemitraan Pemanfaatan Teknologi Industri) yang dijalankan BBSPJPPI.

a. Hasil yang telah dicapai

Pada tahun 2022, sesuai Nota Dinas Kepala OPTIKJI BSKJI Nomor B/2017/BSKJI.4/LB/IV/2022 tanggal 7 April 2022 terkait hasil workshop seleksi proposal DAPATI TA 2022, BBSPJPPI mendapatkan persetujuan untuk pelaksanaan 4 (empat) kegiatan DAPATI yang akan didanai di tahun 2022

Adapun capaian pelaksanaan kegiatan DAPATI ditinjau dari peningkatan produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultansi sebagai berikut:

Tabel 3.7. Performansi DAPATI yang diukur

No	Nama Perusahaan	Performansi yang Diukur	Performansi sebelum Pendampingan	Performansi setelah Pendampingan	Peningkatan Produktivitas/ efisiensi (%)
1.	IKM PT. Mirasa Food Industry	Pengukuran performansi berupa penurunan produk reject setelah penerapan ISO 9001 : 2015	Produk reject 43,23 ton/bulan (14,41 %)	Produk reject sebesar 32,58 ton/bulan (10,86 %)	3,55
2.	CV. Aska Waluya	Peningkatan kualitas mutu produk dengan penurunan kadar oksaat pada produk tepung porang	Kadar Oksalat 93,8 gram/ 1 kg tepung porang. (9,38 %)	Kadar Oksalat 60,55 gram/ 1 kg tepung porang (6,055%).	3,33
3.	UD. Sugiyanto	Peningkatan kualitas produk garam dengan meningkatnya derajat keputihan	Rata-rata tingkat derajat keputihan : 28,15 %.	Rata-rata tingkat derajat keputihan 39,4 %	11,25
4.	PT. Algaepark Indonesia Mandiri	Peningkatan efisiensi biaya investasi dan operasional	Biaya Rp 22.647.692 / 100 m ² luas kolam.	Biaya Rp 10.094.444 / 100 m ² luas kolam.	55,42
				Rata-Rata	18,38

b. Analisis hasil yang telah dicapai

Berdasarkan hasil pelaksanaan pendampingan terhadap IKM industri selama kegiatan DAPATI diperoleh capaian rata-rata produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi adalah sebesar 18,38% lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar 10%.

Tabel 3.8. Target dan capaian indikator

Indikator Kinerja	Target	Capaian	% Capaian
Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi	10%	18,38%	183

Analisis penyebab keberhasilan :

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan DAPATI dalam memenuhi target yang ditetapkan dikarenakan dalam penentuan tim dan anggota tim DAPATI telah mempertimbangkan kebutuhan dan kompetensi personil yang diperlukan dalam menunjang pelaksanaan DAPATI. Selain itu, dalam proses penyusunan proposal juga telah dilakukan identifikasi awal dan survey lapangan untuk mengidentifikasi permasalahan sekaligus solusi yang dibutuhkan oleh industri yang akan diupayakan melalui pelaksanaan kegiatan DAPATI. Pada proses pelaksanaan, disamping adanya kooperatif dari pihak IKM penerima, Tim DAPATI juga secara rutin melakukan verifikasi dan supervisi ke lapangan secara berkala sehingga capaian progres output kegiatan dapat terpantau dan di akhir kegiatan target dapat tercapai sesuai yang ditetapkan.

c. Kendala

Diluar aspek teknis yang tidak terdapat kendala berarti, pada pelaksanaan kegiatan DAPATI tahun 2022 masih ditemui kendala yang berdampak pada keterlambatan pelaksanaan kegiatan DAPATI di lapangan dikarenakan adanya kendala waktu pencairan anggaran DAPATI yang cukup lama mengingat penganggaran kegiatan DAPATI 2022 berada pada DIPA Pusat OPTIKJI BSKJI.

d. Rekomendasi

Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dan anggaran sesuai rencana, maka untuk kegiatan DAPATI yang telah lolos seleksi proposal oleh Pusat OPTIKJI pengalokasian anggarannya sebaiknya dapat direalokasi ke dalam DIPA masing-masing satker penerima kegiatan DAPATI.

2. Meningkatnya utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri

Kegiatan yang dilaksanakan oleh balai-balai adalah kegiatan pelayanan yang meliputi rencang bangun dan perekayasaan di bidang industri, standardisasi dan sertifikasi, pengujian, kalibrasi serta pelatihan teknis. Jumlah SPK/order dari kegiatan –kegiatan tersebut perlu diawasi dan diukur agar dijadikan landasan kinerja BSKJI. Kegiatan layanan teknis yang diselenggarakan balai-balai di lingkup BSKJI berperan dalam mendukung penerapan kebijakan standardisasi industri.

a. Hasil yang telah dicapai

Target dari indikator meningkatnya utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri adalah 2 Persen dengan realisasi 41,37 %.Perhitungan didapat dari:
Penerimaan TA 2022 - Penerimaan TA 2021

$$\frac{\text{Penerimaan TA 2021}}{\text{Rp. 10.475.231.932}} = 41,37\%$$

$$\frac{(\text{Rp.14.809.403.248} - \text{Rp.10.475.231.932})}{\text{Rp. 10.475.231.932}}$$

b. Analisis hasil yang telah dicapai

Tabel 3.9.Target dan capaian indikator

Meningkatnya Utilisasi Layanan Jasa Industri di Dalam Negeri

Indikator Kinerja	Target	Capaian	% Capaian
Meningkatnya utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri	2 Persen	41,37 Persen	2068

Analisis penyebab keberhasilan :

Kondisi operasional jasa layanan BBSJPPI di tahun 2022 sejak awal tahun telah kembali berjalan sesuai kapasitas semula seperti kondisi sebelum masa pandemi. Hal ini berdampak terhadap capaian realisasi

penerimaan PNBK (yang berasal dari realisasi pemberian jasa layanan teknis) yang lebih tinggi di banding tahun sebelumnya dimana operasional jasa layanan baru kembali berjalan normal setelah periode Semester I 2021 dikarenakan adanya pembatasan aktivitas perkantoran selama semester I 2021 untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Disamping itu upaya promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPI serta pengembangan kapasitas layanan (Konsultasi Penyusunan Dokumen Standar Teknis dan Sistem Manajemen Lingkungan) juga dipandang turut berdampak terhadap peningkatan realisasi permintaan atas jasa layanan teknis di tahun 2022.

Tabel 3.10 capaian indikator meningkatnya utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri dibandingkan dengan Renstra 2021-2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Indikasi Capaian					
			2021		2022		Total	
			T	R	T	R	T	R
Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam negeri	meningkatnya utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri	Persen	2	26	2	41,37	-	-

Pada Tabel 3.10 didapat realisasi TA 2021 dan 2022 meningkat capaiannya dibandingkan dengan target. Target TA 2021 dan 2022 tetap tetapi realisasinya meningkat. Pada Tahun 2021 capaian peningkatan 26% sedangkan 2022 sebesar 41,37%.

c. Kendala

Tidak ada kendala

d. Rekomendasi

Rencana perbaikan di Tahun Anggaran selanjutnya adalah

1. Pengembangan kapasitas layanan melalui pengembangan jasa layanan BBSPJPI meliputi pemberian layanan sertifikasi halal, uji profisiensi, verifikasi GRK dan komersialisasi produk inovasi teknologi.
2. Meningkatkan jumlah ruang lingkup pengujian yang terakreditasi dengan harga yang bersaing (dipengaruhi upaya modernisasi peralatan).

3. Penambahan kuantitas dan kompetensi SDM teknis melalui pelaksanaan pelatihan lead auditor ISO 9001 (direncanakan untuk penambahan 5 auditor), penambahan jumlah auditor halal, verifikator GRK dan TKDN melalui pelaksanaan pelatihan teknis .
 4. Pembentukan Tim Optimalisasi Teknologi untuk menunjang layanan jasa optimalisasi pemanfaatan teknologi.
 5. Segera dilakukan koordinasi tingkat internal Kemenperin (BSKJI dan Biro Keuangan) untuk memproses pengajuan usulan perubahan tarif jasa layanan BLU BBSJPPI kepada Kementerian Keuangan.
3. Peningkatan jumlah lingkup layanan jasa industri di dalam negeri

Salah satu sasaran strategis dari BSKJI adalah penguatan sarana dan prasarana layanan jasa industri diantaranya lembaga penilai kesesuaian. Dalam mendukung kebijakan penerapan standardisasi industri, lembaga penilai kesesuaian diharapkan mampu memberikan pelayanan sesuai dengan ruang lingkup penerapan kebijakan standardisasi yang telah diterapkan Pemerintah. Penambahan ruang lingkup dan parameter jasa industri juga sebagai bentuk diversifikasi jasa layanan yang ditawarkan kepada industri.

a. Hasil yang telah dicapai

Pada tahun 2022, bersamaan dengan proses asesmen Reakreditasi Laboratorium Kalibrasi BBSJPPI telah turut diajukan perluasan ruang lingkup layanan kalibrasi untuk lingkup:

- 1) Kalibrasi alat gas analyser-CO
- 2) Kalibrasi alat gas analyser-NO
- 3) Kalibrasi alat gas analyser-SO₂
- 4) Kalibrasi alat thermometer digital

b. Analisis hasil yang telah dicapai

Dari indikator kinerja peningkatan jumlah lingkup layanan jasa industri di dalam negeri, hasil yang didapat lebih tinggi dimana dari target 3 (tiga) ruang lingkup dengan realisasi 4 (empat) ruang lingkup (133 % dari target).

Tabel 3.11. Target dan capaian indikator Peningkatan Jumlah Lingkup
 Layanan Jasa Industri di dalam Negeri

Indikator Kinerja	Target	Capaian	% Capaian
Peningkatan jumlah lingkup layanan jasa industri di dalam negeri	3 Ruang Lingkup	4 Ruang Lingkup	133

Analisa Penyebab Keberhasilan :

Peningkatan jumlah ruang lingkup layanan merupakan bentuk komitmen dari BBSPJPPI dalam memperluas kemampuan dalam pemberian jasa layanan kepada pelanggan yang diharapkan turut dapat berdampak pada peningkatan realisasi penerimaan PNPB jasa layanan.

Disamping itu dalam proses pengajuan ruang lingkup telah dilengkapi dengan dokumen dan bukti yang diperlukan yang menunjang proses pengajuan perluasan ruang lingkup sehingga pada saat proses Asesmen oleh Tim Asesor KAN proses penambahan ruang lingkup mendapatkan persetujuan dari KAN.

Tabel 3.12 capaian indikator Peningkatan jumlah lingkup layanan jasa industri di dalam negeri dibandingkan dengan Renstra 2021-2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Indikasi Capaian					
			2021		2022		Total	
			T	R	T	R	T	R
Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam negeri	Peningkatan jumlah lingkup layanan jasa industri di dalam negeri	Ruang Lingkup	3	6	3	4	6	10

Dari table 3.12 jika dibandingkan realisasi peningkatan jumlah lingkup layanan jasa TA 2022 dibanding TA 2021 mengalami penurunan.

Tetapi untuk target capaian TA 2021 sampai 2022 mencapai 6 ruang lingkup sedangkan realisasinya 10 ruang lingkup.

c. Kendala

Tidak ada kendala

d. Rekomendasi

Perlu dikaji peluang pemberian layanan kepada industri yang saat ini belum dapat dilakukan BBSPJPPI dan selanjutnya dapat diajukan usulan perluasan ruang lingkup dengan menyiapkan segala infrastruktur yang diperlukan.

4. Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa

Penggunaan produk dalam negeri dalam penggunaan barang dan jasa merupakan salah satu upaya dalam menindaklanjuti Kepres 24 Tahun 2018 tentang Tim nasional P3DN. Pengoptimalan penggunaan produk industri dalam negeri bisa dimulai dari anggaran belanja kementerian/lembaga. Pemanfaatan barang/jasa di dasarkan pada pemakaian akun untuk belanja pemerintah, dalam hal ini Kementerian perindustrian.

Berdasarkan perhitungan data pagu anggaran dan realisasi 2022 berdasarkan akun yang telah disepakati bersama, yaitu akun 521211, 521219, 521811, 522192, 524114, 521111, 521131, 522141, 524119, 522131, 522191, 521241, 521841, 532111, 533111, Akun BLU 525121, 525154, 525153, 537112, 537113 dengan mengacu pada data aplikasi intranet/Online Monitoring SPAN (OM SPAN).

Nilai realisasi capaian penggunaan produk dalam negeri (R_{P3DN}) didapat dari Realisasi anggaran P3DN berdasarkan akun terpilih dibagi Total pagu anggaran P3DN berdasarkan akun terpilih

a. Hasil yang telah dicapai

BBSPJPPI sebagai satker di bawah Kementerian Perindustrian berupaya dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri sesuai Surat Edaran Menteri Perindustrian No 4 Tahun 2019 Tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.

Berdasarkan perhitungan data pagu anggaran dan realisasi 2022 berdasarkan akun yang telah di sepakati bersama, yaitu akun 521211, 521219, 521811, 522192, 524114, 521111, 521131, 522141, 524119, 522131, 522191, 521241, 521841, 532111, 533111 dengan mengacu pada data Monitoring Pagu dan Realisasi PDN menu e-Monitoring APBN pada sistem Intranew diperoleh data perhitungan % Realisasi PDN dan TKDN sebesar 88,11 Persen dengan rincian:

- Pagu anggaran terpilih : Rp. 523.549.000,-
- Realisasi PDN : Rp. 430.358.637,-
- Realisasi TKDN : Rp. 30.960.650,-
- Realisasi Impor : Rp. 60.348.235,-

Tabel 3.13. Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa sesuai akun terpilih

Akun Terpilih	Realisasi Anggaran P3DN berdasarkan akun terpilih (RAP3DN)	Pagu anggaran P3DN berdasarkan akun terpilih (TotAP3DN)	Persentase Realisasi
521211	-	-	-
521219	-	-	-
521811	137.772.500	Rp.137.949.000	99,87
522192	-	-	-
524114	-	-	-
521111	305.124.705	Rp. 313.100.000	97,45
521131	-	Rp. 54.000.000	-
522141	-	-	-
524119	18.422.082	Rp.18.500.000	99,58
522131	-	-	-
522191	-	-	-
521241	-	-	-
521841	-	-	-
532111	-	-	-
533111	-	-	-
Total	461.319.287	Rp.523.549.000,-	88,11

b. Analisa hasil yang telah dicapai

Dari indikator kinerja persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa, hasil yang didapat lebih tinggi dimana dari target 58 Persen dengan realisasi 88,11 Persen (151 % dari target).

Tabel 3.14. Target dan capaian indikator Persentase Nilai Capaian
 Penggunaan Produk Dalam negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Indikator Kinerja	Target	Capaian	% Capaian
Penggunaan produk dalam negeri dalam penggunaan barang dan jasa	58 %	88,11%	151

Analisa penyebab keberhasilan :

Telah dilakukan identifikasi potensi penggunaan produk/jasa dalam negeri pada kegiatan pengadaan barang/jasa dalam DIPA BBSPJPPI tahun berjalan dimana turut diidentifikasi peluang substitusi pengadaan bahan kimia dan sarpras perkantoran yang semula berasal dari impor dengan produk yang telah diproduksi di dalam negeri ataupun yang telah memenuhi TKDN.

Tabel 3.15 capaian indikator Penggunaan produk dalam negeri dalam penggunaan barang dan jasa dengan Renstra 2021-2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Indikasi Capaian					
			2021		2022		Total	
			T	R	T	R	T	R
Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam negeri	Penggunaan produk dalam negeri dalam penggunaan barang dan jasa	Persen	55	58	58	88.11	-	-

Dari tabel 3.15 didapat bahwa realisasi penggunaan produk dalam negeri dalam penggunaan barang dan jasa meningkat dari Tahun 2021 ke Tahun 2022. Hal ini sejalan dengan komitmen BBSPJPPI yang memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri

c. Kendala

Masih terdapat produk barang yang menunjang operasional layanan (bahan kimia, peralatan uji, sparepart) yang masih belum dapat diproduksi di dalam negeri.

d. Rekomendasi

Rencana di Tahun Anggaran selanjutnya adalah pada proses pengadaan barang/jasa serta belanja pemerintah agar tetap memprioritaskan barang dan jasa yang telah dapat diproduksi di dalam negeri.

Untuk barang maupun jasa yang masih belum dapat dipenuhi di dalam negeri (untuk pengadaan barang/jasa yang dipenuhi dari impor atau TKDN di bawah 25%) dalam proses impornya agar dapat melakukan pengajuan persetujuan tertulis kepada Menteri Perindustrian/Pejabat yang ditunjuk

IV. Sasaran Kinerja IV : Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien

1. Indikator Kinerja : Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker

Pengawasan internal melalui pelaksanaan audit kinerja yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal setiap tahun sebagai wujud kontrol dan pendampingan atas pelaksanaan kegiatan maupun anggaran agar tetap berada dalam koridor aturan maupun rencana strategis yang telah ditetapkan. Setiap tahunnya hasil pengawasan yang dilakukan Tim Inspektorat Jenderal ini dituangkan dalam laporan hasil pengawasan internal dimana terdapat rekomendasi yang harus ditindaklanjuti, dan Satker diharapkan dapat responsif melakukan penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan dimaksud.

a. Hasil yang telah dicapai

Pelaksanaan audit kinerja TA 2021 dalam rangka pengawasan internal pada unit kerja BBSPJPPI telah dilakukan oleh Tim Inspektorat III Kementerian Perindustrian pada 6 sd 11 Juni 2022. Terdapat beberapa temuan hasil audit kinerja BBSPJPPI yang tertuang dalam Daftar Temuan Hasil Audit BBSPJPPI TA 2021 yang terdiri dari 3 (tiga) point temuan terkait program/pelaksanaan kegiatan dan 5 (lima) point temuan terkait keuangan dan BMN.

Berdasarkan surat dari Inspektorat Jenderal Nomor R/121/IJ-IND/PW/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022 seluruh temuan atas hasil audit kinerja Itjen TA 2021 pada satker BBSPJPPI seluruhnya telah ditindaklanjuti dan dinyatakan selesai.

b. Analisa hasil yang telah dicapai

Pada indikator rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker targetnya adalah 92 % dengan realisasi 100 %.

Tabel 3.16. Target dan capaian indikator Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal telah ditindaklanjuti oleh satker

Indikator Kinerja	Target	Capaian	% Capaian
Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	92 %	100%	108

Analisis penyebab keberhasilan

Terkait hasil audit kinerja, menindaklanjuti atas rekomendasi hasil pengawasan oleh Inspektorat Jenderal telah dilakukan penyusunan Rencana Aksi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan TA 2021 Pada Satker BBSPJPI dimana didalamnya memuat penanggung jawab untuk masing-masing hasil temuan berikut timeline batas waktu penyampaian tindak lanjut atas hasil temuan. Dalam hal ini masing-masing penanggung jawab telah berkomitmen menyampaikan hasil temuan sesuai batas waktu yang ditentukan.

Selain itu koordinasi intensif dengan bagian tindak lanjut pengawasan pada Sekretariat Inspektorat Jenderal Kemenperin beserta Tim Auditor terkait penyampaian bukti tindak lanjut hasil pengawasan turut berperan dalam penyelesaian hasil temuan.

Tabel 3.17 capaian indikator Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh Satker dengan Renstra 2021-2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Indikasi Capaian					
			2021		2022		Total	
			T	R	T	R	T	R
Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh Satker	Persen	91,5	100	92	100	-	-

Dari tabel 3.17 untuk realisasi rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker pada TA 2021 dan 2022 tercapai 100 %. Ini merupakan komitmen dari BBSPJPPI setiap tahun untuk menindaklanjuti dan menyelesaikan hasil temuan dari Inspektorat Jenderal Kemenperin III.

c. Kendala

Tidak ada kendala

d. Rekomendasi

Untuk tahun anggaran selanjutnya adalah pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan ketentuan perundangan agar meminimalisir hasil temuan dan sekiranya pada pelaksanaan audit kinerja TA 2022 dalam rangka pengawasan internal pada unit kerja BBSPJPPI di dapatinya temuan agar dapat segera ditindaklanjuti dengan menyampaikan bukti tindak lanjut sesuai batas waktu yang ditentukan.

V. Sasaran Kinerja V : Terselenggaranya urusan pemerintahan di Bidang perindustrian yang berkelanjutan

1. Indikator Kinerja : Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri.

Tingkat kepuasan pelanggan yang dicapai oleh Satker diukur melalui hasil survey kepuasan pelanggan dengan menggunakan metode tertentu dengan cara menyebarkan kuesioner yang sudah diuji validitasnya. Target kinerja IKM minimal indeks 3,6 dengan skala indeks 1-4.

Pengolahan data kuesioner dilakukan dengan metode pengukuran skala yang digunakan untuk mengukur nilai harapan dan kinerja dengan skala likert 1 sampai 5. Nilai 1 (satu) “sangat tidak berharap” untuk kelompok harapan dan berarti “sangat buruk” untuk kelompok kinerja. Sedangkan nilai 5 (lima) yang berarti “sangat berharap” untuk kelompok harapan dan berarti “sangat puas” untuk kelompok kinerja. Kuesioner yang dikirim ke pelanggan sesuai dengan format Permen PAN&RB no 14 Tahun 2017.

a. Hasil yang telah dicapai

Telah dilaksanakan survey kepuasan masyarakat atas jasa layanan BBSPJPPI dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017. Berdasarkan perhitungan indeks IKM

untuk kuesioner kepuasan pelanggan yang masuk sd Desember 2022 sejumlah 329 kuesioner diperoleh nilai indeks kepuasan masyarakat sebesar 3,66 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.18 .Jumlah dan penilaian kuesioner

Indikator Kinerja	Responden dengan Indeks 1	Responden dengan Indeks 2	Responden dengan Indeks 3	Responden dengan Indeks 4	Total responden
Indeks Kepuasan Masyarakat	0	16	200	113	329

b. Analisa hasil yang telah dicapai

Pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat targetnya adalah 3,60 (indeks) dengan realisasi 3,66 (indeks) atau dengan persen capaian 102%.

Tabel 3.19.Target dan capaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat

Indikator Kinerja	Target	Capaian	% Capaian
Indeks Kepuasan Masyarakat	3.6	3.66	102

Analisis penyebab keberhasilan :

Keberhasilan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat yang melebihi target dan meningkat dibanding tahun 2021 adalah adanya komitmen dari BBSPJPI untuk selalu mengedepankan pelayanan prima kepada pelanggan. Disamping itu masukan ataupun umpan balik yang diperoleh dari pengisian kuesioner kepuasan pelanggan telah dimanfaatkan sebagai masukan/saran untuk perbaikan layanan BBSPJPI kedepannya.

Tabel 3.20

Perkembangan Kepuasan Pelanggan Tahun 2018-2022

Tahun	Target	Realisasi
2018	3.6	3.6
2019	3.6	3.46
2020	3.6	3.7
2021	3.6	3.65
2022	3.6	3.66

Dari tabel 3.20 didapat bahwa capaian Indeks Kepuasan Masyarakat dari Tahun 2021 ke Tahun 2022 mengalami peningkatan. Hal ini tidak lepas dari peningkatan kualitas BBSPJPPI baik dari sisi layanan teknis maupun layanan dari aspek administrasi yang lebih memudahkan pelanggan.

c. Kendala

Dikarenakan realisasi melebihi target indikator kinerja maka tidak ada kendala. Namun demikian terdapat kendala non teknis yang apabila ditindaklanjuti dapat berpeluang untuk meningkatkan nilai IKM seperti : tingkat partisipasi /keterlibatan pelanggan dalam pengisian kuesioner IKM rendah, masih terdapat informasi terkait fasilitas/sarpras layanan dan upaya peningkatan layanan belum terinformasi ke pelanggan

d. Rekomendasi

Rencana pada tahun selanjutnya adalah :

- Komunikasi secara intens ke pelanggan untuk proses pengisian dan penyampaian kuesioner kepuasan pelanggan.
- Edukasi kepada pelanggan terkait upaya peningkatan layanan BBSPJPPI untuk memaksimalkan penilaian IKM.
- Untuk meningkatkan partisipasi pengisian kuesioner oleh pelanggan, dapat dibuatkan kuesioner kepuasan pelanggan secara online yang wajib diisi oleh pihak pelanggan sebelum pihak pelanggan menerima hasil layanan.

•

VI. Terwujudnya ASN BSKJI yang professional

1. Indikator Kinerja : Rata-rata indeks profesionalitas ASN

Perhitungan indeks merujuk pada Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 Tanggal 15 Mei 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Indeks Profesional ASN adalah suatu instrument yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN.

a. Hasil yang telah dicapai

Nilai Indeks Profesional ASN diukur melalui dimensi Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja dan Disiplin sesuai Peraturan BKN Nomor 8 Tahun

2019 Tanggal 15 Mei 2019. Hasil Penilaian akhir indeks profesionalitas ASN satker BBSPJPI sesuai rekap IPASN Intranet Kemenperin sebesar 77,07

b. Analisa hasil yang telah dicapai

Pada indikator Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN target nilai yang ditetapkan sebesar 76 dengan nilai realisasi 77,07 atau tingkat capaian 101 %. Nilai ini tidak mencapai target yang telah ditetapkan.

Tabel 3.21. Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% capaian
Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN	76	77,07	101

Analisa penyebab keberhasilan

Pada Indeks Profesionalitas ASN sesuai target dikarenakan koordinasi yang baik bagian umum kepegawaian yang aktif memberikan info pelatihan/diklat teknis sesuai jabatan masing-masing (struktural dan fungsional). Selain itu sikap proaktif pegawai yang setelah melakukan Diklat/Bimtek/Seminar/Webinar mengumpulkan bukti ke Bagian Kepegawaian untuk direkap.

Tabel 3.22 capaian indikator Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN dengan Renstra 2021-2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Indikasi Capaian					
			2021		2022		Total	
			T	R	T	R	T	R
Terwujudnya ASN BSKJI yang profesional	Rata-Rata Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	74	66	76	77,07	-	-

Dari Tabel 2.22 capaian Indeks Profesionalitas ASN dari Tahun 2021 tidak mencapai target tetapi untuk tahun 2022 mencapai target yang ditetapkan.

Tabel 3.23 Perbandingan capaian Indeks IPASN BBSPJPPI dengan
 satker lain (Data per 10 Februari 2023)

No	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	Nilai IPASN
1	412528	BBSPJIKFK	72,75
2	247136	BBSPJIA	63,40
3	247157	BBSPJI KMN	75,75
4	248042	BBSPJIT	74,70
5	247140	BBSPJIBBT	73,70
6	248056	BBSPJIS	74,73
7	248060	BBSPJILM	72,44
8	247199	BBSPJI KKP	76,32
9	247204	BBSPJI KB	81,79
10	247161	BBSPJPPI	77,07
11	247403	BBSPJI HPMM	74,25
12	248124	BSPJI BANDA ACEH	56,67
13	247225	BSPJI MEDAN	73,36
14	539053	BSPJI PADANG	73,63
15	248920	BSPJI PALEMBANG	81,51
16	539060	BSPJI LAMPUNG	70,71
17	247211	BSPJI SURABAYA	82,76
18	247232	BSPJI BANJARBARU	83,73
19	539074	BSPJI PONTIANAK	73,61
20	539081	BSPJI SAMARINDA	80,43
21	247246	BSPJI MANADO	71,98
22	248145	BSPJI AMBON	74,28
23	015118	BSPJI JAKARTA	75,50
24	417912	BSPJI PEKANBARU	77,67

c. Kendala

Tidak ada kendala pada capaian nilai indeks profesionalitas ASN tetapi nilai masih dapat ditingkatkan dengan memfasilitasi pegawai ASN yang belum mengikuti diklat sesuai jabatan masing-masing.

d. Rekomendasi

Rencana perbaikan di tahun selanjutnya adalah memfasilitasi diklat peningkatan kompetensi pegawai, mengkoordinir penyampaian realisasi dan bukti partisipasi pelatihan personil secara berkala, memfasilitasi penerbitan sertifikat untuk pelatihan yang diselenggarakan internal (in house training), monitoring jadwal pelaksanaan pelatihan oleh penyelenggara dan pendaftaran pelaksanaan pelatihan sesuai dengan kebutuhan peningkatan kompetensi.

2. Indikator Kinerja : Nilai Disiplin Pegawai

Disiplin Pegawai Negeri sipil adalah kesanggupan pegawai negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin. Disiplin pegawai secara umum

merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai negeri sipil. Dalam indikator nilai minimal disiplin pegawai yang dimaksud dengan disiplin pegawai dibatasi pada komponen jam kerja, jam pulang, alpa dan komponen lain seperti dinas luar, sakit, izin dan tugas belajar.

a. Hasil yang telah dicapai

Perhitungan disiplin pegawai merujuk pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 49/M-IND/PER/6/2014 tentang Penilaian Kinerja Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Perindustrian. Nilai disiplin pegawai merujuk pada penilaian absensi untuk setiap satker dengan komponen jam kerja, jam masuk, jam pulang, alpa, dinas luar/tugas luar, sakit, izin, cuti, tugas belajar/diklat.

Nilai rata-rata disiplin pegawai satker BBSPJPPI selama periode Januari sd Desember 2022 sebesar 83,10.

b. Analisa hasil yang telah dicapai

Pada indikator Nilai Disiplin Pegawai target nilai yang ditetapkan sebesar 82 dengan nilai realisasi 83,10 atau tingkat capaian 101%.

Tabel 3.24. Target dan Capaian Nilai Disiplin Pegawai

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% capaian
Nilai Disiplin Pegawai	82,00	83,10	101

Analisa penyebab keberhasilan :

Nilai disiplin pegawai tercapai dikarenakan kesadaran pegawai BBSPJPPI untuk log in masuk dan log in waktu jam pulang serta atasan yang mengingatkan staff untuk absensi online setiap hari.

Tabel 3.25. capaian indikator Nilai Disiplin Pegawai dengan Renstra
2021-2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Indikasi Capaian					
			2021		2022		Total	
			T	R	T	R	T	R
Terwujudnya ASN BSKJI yang profesional	Nilai Disiplin Pegawai	Nilai	81	84	82	83,10	-	-

Dari tabel 3.25 ,capaian nilai disiplin pegawai Tahun 2021 dan 2022 mencapai target yang ditetapkan tetapi penilaian TA 2022 mengalami penurunan dibanding capaian TA 2021.

c. Kendala

Tidak ada kendala pada capaian nilai disiplin pegawai tetapi nilai masih dapat ditingkatkan dengan meningkatkan kesadaran pada masing masing pegawai untuk log in Intranet pada saat jam masuk dan jam pulang di hari kerja.

d. Rekomendasi

Rencana perbaikan di Tahun Selanjutnya adalah melakukan sosialisasi tentang penilaian nilai disiplin pegawai dan memberikan informasi

tambahan bagi pegawai terkait capaian Perjakin dengan indicator kinerja nilai disiplin pegawai.

VII. Penguatan layanan publik

Koordinasi dan pelaksanaan layanan public merupakan salah satu fungsi Sekretariat BSKJI. Layanan publik dalam hal ini adalah layanan public yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana teknis (UPT) di lingkungan BSKJI. Pelayanan public sesuai Permenpan RB No 17 Tahun 2017 adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai peraturan perundang undangan setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa dan /atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

1. Indikator Kinerja : Nilai Minimal indeks layanan public

a. Hasil yang telah dicapai

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan Kementerian PAN & RB atas kinerja pelayanan publik BBSPJPPI berdasarkan keputusan Menteri PAN & RB Nomor 1035 Tahun 2022 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kementerian, Lembaga, Dan Pemerintah Daerah Tahun 2022, unit pelayanan publik BBSPJPPI ditetapkan sebagai salah satu unit yang berhasil menerapkan pelayanan prima dengan indeks nilai 4,58 kategori A.

b. Analisa hasil yang telah dicapai

Tabel 3.26. Nilai minimal indeks layanan publik

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% capaian
Nilai minimal indeks layanan publik	A-	A	114

Analisa penyebab keberhasilan :

Komitmen dari Kepala BBSPJPPI agar meningkatkan layanan yang berbasis online sehingga lebih memudahkan pelanggan untuk menggunakan jasa BBSPJPPI dan dapat menjangkau pangsa pasar yang luas.

Tabel 3.27 capaian indikator Nilai Minimal Indeks Layanan Publik dengan Renstra 2021-2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Indikasi Capaian					
			2021		2022		Total	
			T	R	T	R	T	R
Penguatan Layanan Publik	Nilai Minimal Indeks Layanan Publik	Indeks	A-	A-	A-	A	-	-

Dari table 3.27 Nilai Minimal Indeks Layanan Publik mengalami peningkatan capaian dari Tahun 2021. Dimana Tahun 2022 mendapat nilai A dengan nilai 4,58 sedangkan Tahun 2021 capainnya A- dengan nilai 4,01.

c. Kendala

Meskipun capaian target sudah terlampaui masih ada hal hal yang bisa yang menjadi kendala seperti belum terdapat personil/SDM internal yang memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi sehingga BBSPJPPI masih menggunakan pihak ke-3 dan bergantung pada tenaga ahli eksternal dalam proses pengembangan sistem informasi balai.

d. Rekomendasi

Rencana perbaikan di tahun Anggaran selanjutnya adalah meningkatkan kompetensi pegawai BBSPJPPI di Bidang IT terkait pengembangan Sistem Informasi Digital Terintegrasi (SINDII).

VIII. Penguatan Akuntabilitas Organisasi

1. Indikator Kinerja : Nilai minimal akuntabilitas kinerja

Evaluasi dilakukan terhadap penerapan sistem akuntabilitas kinerja pada setiap instansi pemerintah. Dalam evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian terhadap seluruh satker di lingkungan Kemenperin, penilaian dilakukan terhadap 5 (lima) komponen, yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja. Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilakukan setelah tahun anggaran berakhir, sehingga nilai capaiannya indikator ini dapat terlihat pada pertengahan tahun anggaran setelahnya.

Pada tahun 2022, pelaksanaan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilakukan untuk mengevaluasi pelaksanaan SAKIP 2021

dengan mengacu pada ketentuan PerMenPAN RB Nomor 88 Tahun 2021.

a. Hasil yang telah dicapai

Berdasarkan Evaluasi atas implementasi SAKIP 2021 pada satker BBSPJPPI sesuai Laporan Hasil Evaluasi Tim Inspektorat Jenderal kementerian Perindustrian Nomor 04-IJ-IND.4/LHE/IV/2022 tanggal 19 April 2022 satker BBSPJPPI memperoleh nilai sebesar 81,65 atau kategori A. Capaian ini melebihi target dengan persen capaian 100,8 %.

b. Analisa hasil yang telah dicapai.

Tabel 3.28. Nilai minimal akuntabilitas kinerja

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% capaian
Nilai Akuntabilitas Kinerja	81	81,65	100,8

Analisa penyebab keberhasilan:

- 1) Dokumen rencana kinerja anggaran yang disusun lengkap serta selaras dengan Renstra satker dan Renstra Unit Eselon I.
- 2) Laporan akuntabilitas kinerja yang memuat evaluasi kinerja telah disusun secara akurat dan disampaikan secara tepat waktu.
- 3) Komitmen pimpinan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala dan memanfaatkan hasil evaluasi untuk mendukung peningkatan kinerja satker.

Tabel 3.29. capaian indikator Nilai minimal akuntabilitas kinerja dengan Renstra 2021-2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Indikasi Capaian					
			2021		2022		Total	
			T	R	T	R	T	R
Penguatan Akuntabilitas Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai	80,5	82,44	81	81,65	-	-

Dari table 3.29. Capaian Nilai Akuntabilitas kinerja Tahun 2022 mengalami penurunan dibanding Tahun 2021. Tetapi masih mencapai target perjanjian Kinerja yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan pada penilaian SAKIP tahun 2022 mengacu pada ketentuan terbaru yang diatur dalam PerMenPAN RB Nomor 88 Tahun 2021

c. Kendala

Dengan penilaian SAKIP tahun 2022 mengacu pada ketentuan terbaru yang diatur dalam PerMenPAN RB Nomor 88 Tahun 2021, terdapat sedikit kendala terkait pengumpulan dokumen pendukung bukti penilaian dikarenakan masih kurangnya pemahaman atas klausul yang diatur dalam form penilaian.

d. Rekomendasi

Atas kendala yang dihadapi tersebut, rencana perbaikan yang perlu dilakukan diantaranya:

Berkonsultasi dengan bagian evaluasi Sekretariat BSKJI yang menangani penilaian SAKIP terkait klausul penilaian yang belum dipahami serta memanfaatkan peluang diskusi dengan Tim Itjen yang ditunjuk untuk melakukan evaluasi sebagai dasar perbaikan untuk penilaian tahun berikutnya.

Sementara itu, untuk penilaian tahun selanjutnya perlu mempersiapkan data dukung dokumen kelengkapan yang dapat digunakan untuk penilaian SAKIP tahun anggaran 2022.

2. Indikator Kinerja : Nilai minimal laporan keuangan

Laporan Keuangan Kementerian perindustrian merupakan konsolidasi (penggabungan) dari setiap satuan kerja yang berada di lingkungan Kementerian di seluruh Indonesia. Sementara sampai saat ini masih ditemukan beberapa Laporan Keuangan yang masih belum menyajikan Laporan Realisasi anggaran (LRA), neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan atas Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan peraturan yang berlaku. Maka untuk itu perlu dilakukan penilaian atas Laporan Keuangan pada satuan kerja di Lingkungan Kementerian Perindustrian. Penilaian ini bertujuan untuk memberikan motivasi kepada satuan kerja dan diharapkan agar setiap satuan kerja dapat menyusun Laporan Keuangan secara lengkap dan sesuai dengan peraturan yang berlaku serta tepat waktu. Metode penilaian dilakukan berdasarkan desk review dengan data Satuan Kerja yang terkonsolidasi di Biro Keuangan. Metode penilaian menggunakan desk evaluation atas data-data keuangan dan BMN dengan menggunakan kertas kerja penilaian yang berisi penilaian atas empat unsur yang terdiri dari

kesesuaian SAP, kecukupan informasi, ketaatan dalam peraturan dan efektifitas Pengendalian Intern. Kertas kerja penilaian akan diisi oleh tim penilai dari Tim Biro Keuangan.

a. Hasil yang telah dicapai

Penilaian Laporan Keuangan TA 2021 Tingkat Satker di Lingkungan Kemenperin oleh Biro Keuangan Kemenperin telah dilaksanakan pada 15 Agustus 2022 dengan nilai laporan keuangan BBSPJPI tahun 2021 sesuai Nota Dinas Kepala Biro Keuangan Nomor B/857/SJ-IND.3/KU/VIII/2022 tanggal 22 Agustus 2022 sebesar 97,00.

b. Analisa hasil yang telah dicapai

Tabel 3.30. Nilai Minimal Laporan Keuangan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% capaian
Nilai Laporan Keuangan	91	97	106,6

Analisa penyebab keberhasilan

Keberhasilan nilai laporan keuangan ini dikarenakan laporan keuangan telah disusun sesuai ketentuan dengan memperhatikan rekomendasi perbaikan laporan keuangan yang disampaikan Itjen pada saat pelaksanaan review laporan keuangan.

Tabel 3.31. capaian indikator Nilai minimal laporan keuangan dengan Renstra 2021-2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Indikasi Capaian					
			2021		2022		Total	
			T	R	T	R	T	R
Penguatan Akuntabilitas Organisasi	Nilai Laporan Keuangan	Nilai	90	92,30	91	97	-	-

Dari Tabel 3.31 untuk capaian Nilai Laporan Keuangan Tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021.

c. Kendala

Tidak ada kendala

d. Rekomendasi

- Dalam penyajian laporan keuangan agar menyampaikan penjelasan atas isi laporan keuangan (LRA, Neraca, LO, LPE, Pengungkapan

penting lainnya) secara memadai.

- Untuk mempertahankan atau meningkatkan nilai laporan keuangan agar poin-poin penilaian laporan keuangan sebagaimana tertuang dalam surat Kepala Birocana Nomor B 82/SJ-IND.3/KR/I/2022 tanggal 24 Januari 2022 agar dijadikan pedoman dalam penyusunan LK kedepannya.

3.1.2 CAPAIAN PROGRAM PRIORITAS NASIONAL TA. 2022

Pada tahun 2022, dalam DIPA BBSPJPPI tidak terdapat kegiatan yang ditagging untuk kegiatan prioritas nasional.

3.2. AKUNTABILITAS KEUANGAN

3.2.1 Realisasi Anggaran

1. Hasil yang telah dicapai

Realisasi anggaran berdasarkan Renstra Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri sebagai berikut:

Tabel 3.32

Realisasi Keuangan berdasarkan Renstra BBSPJPPI TA. 2021-2024

Tabel 3.32. Realisasi Keuangan Berdasarkan Renstra BBSPJPI TA 2021-2024

Sasaran Kegiatan (output)/Indikator	2021				2022				2023	2024	TOTAL 2021-2024				
	Target Renstra (RP)	Target Perkin (RP)	Realisasi (RP)	Realisasi /Perkin(%)	Target Renstra(RP)	Target Perkin (RP)	Realisasi (RP)	Realisasi/ Perkin(%)	Target Renstra(RP)	Target Renstra(RP)	Target Renstra(RP)	Target Perkin (RP)	Realisasi (RP)	Realisasi/ Perkin(%)	
1	2	3	4	5	6				7	8	9	10	11	12	
1	Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Non Migas														
	Peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri	80,000,000	210,910,000	185,821,503	88,10	100,000,000	219,870,000	215,140,806	97,85	100,000,000	100,000,000	380,000,000	430,780,000	400,962,309	93,08
2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0														
-	Peningkatan peran balai dalam pengembangan industri	430,570,000	448,585,000	96,977,840	21,62	433,820,000	192,530,000	189,124,866	98,23	433,820,000	433,820,000	1,732,030,000	641,115,000	286,102,706	44,63
3	Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri														
	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultansi				..										
	Meningkatnya utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri	2,074,855,000	6,786,123,000	5,881,933,918	86,68	1,619,635,000	4,714,538,000	4,701,468,023	99,72	6,339,370,000	6,320,900,000	16,354,760,000	11,500,661,000	10,583,401,941	92,02
	Peningkatan jumlah lingkup layanan jasa industri di dalam negeri	7,561,688,000	661,970,000	416,995,490	62,99	5,468,938,000	1,825,820,000	1,801,848,841	98,69	7,672,450,000	10,775,000,000	31,478,076,000	2,487,790,000	2,218,844,331	89,19

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN ANGGARAN 2022
BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI**

	Sasaran Kegiatan (output)/Indikator	2021				2022				2023	2024	TOTAL 2021-2024			
		Target Renstra (RP)	Target Perkin (RP)	Realisasi (RP)	Realisasi /Perkin(%)	Target Renstra(RP)	Target Perkin (RP)	Realisasi (RP)	Realisasi/ Perkin(%)	Target Renstra(RP)	Target Renstra(RP)	Target Renstra(RP)	Target Perkin (RP)	Realisasi (RP)	Realisasi/ Perkin(%)
1		2	3	4	5	6			7	8	9	10	11	12	
	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	592,030,000	2,728,723,000	1,730,972,794	63,44	2,786,240,000	3,966,530,000	3,808,556,930	96,02	915,610,000	841,240,000	5,135,120,000	6,695,253,000	5,539,529,724	82,74
4	Tercapainya Pengawasan Internal Yang Efektif dan Efisien														
-	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	24,060,000	63,920,000	28,879,176	45,18	48,440,000	28,540,000	27,952,303	97,94	61,680,000	61,680,000	195,860,000	92,460,000	56,831,479	61,47
5	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan														
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	5,604,757,000	555,515,000	254,183,493	45,76	5,981,765,000	300,660,000	293,610,624	97,66	5,932,050,000	6,451,487,000	23,970,059,000	856,175,000	547,794,117	63,98
6	Terwujudnya ASN BSKJI yang Profesional														
	Rata-rata indeks profesionalitas ASN	132,293,000	132,293,000	85,932,356	64,96	422,770,000	336,530,000	325,886,893	96,84	425,420,000	425,420,000	1,405,903,000	468,823,000	411,819,249	87,84
	Nilai disiplin pegawai	12,311,585,000	12,035,262,000	11,821,877,700	98,23	14,132,264,000	14,147,380,000	14,102,415,082	99,68	17,043,450,000	17,155,764,000	14,147,380,000	26,182,642,000	25,924,292,782	99,01
7	Penguatan Layanan Publik														
	Nilai minimal indeks layanan publik	686,135,000	5,966,917,000	5,341,411,145	89,52	516,680,000	5,610,920,000	5,324,912,000	94,90	751,340,000	716,680,000	2,670,835,000	11,577,837,000	10,666,323,145	92,13

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN ANGGARAN 2022
BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI**



Sasaran Kegiatan (output)/Indikator	2021				2022				2023	2024	TOTAL 2021-2024			
	Target Renstra (RP)	Target Perkin (RP)	Realisasi (RP)	Realisasi /Perkin(%)	Target Renstra(RP)	Target Perkin (RP)	Realisasi (RP)	Realisasi/ Perkin(%)	Target Renstra(RP)	Target Renstra(RP)	Target Renstra(RP)	Target Perkin (RP)	Realisasi (RP)	Realisasi/ Perkin(%)
1	2	3	4	5	6				7	8	9	10	11	12
8 Penguatan Akuntabilitas Organisasi														
Nilai minimal akuntabilitas kinerja	81,430,000	41,570,000	7,031,000	16,91	68,690,000	33,900,000	33,775,481	99,63	72,545,000	72,545,000	295,210,000	75,470,000	40,806,481	54,07
Nilai minimal laporan keuangan	107,385,000	55,000,000	55,000,000	100	114,780,000	114,780,000	114,701,918	99,93	114,780,000	114,780,000	451,725,000	169,780,000	169,701,918	99,95

Sedangkan realisasi keuangan berdasarkan indikator Perjanjian Kinerja TA.

2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.33
Realisasi Keuangan Berdasarkan Perjanjian Kinerja TA 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Komponen	Anggaran (Rp)		
						Pagu	Realisasi	%
1	Meningkatnya daya saing industri pengolahan non migas	Peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri	1 Kolaborasi	1 Kolaborasi	▪ Jasa Pelayanan Optimasi Pemanfaatan Teknologi	219.870.000	215.140.806	97,85
2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	Peningkatan peran balai dalam pengembangan industri	4 Perusahaan	5 Perusahaan	▪ Jasa Pelayanan Pelatihan Teknis	192.530.000	189.124.866	98,23
3	Meningkatnya kemampuan industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	1. Produktivitas/efisiensi perusahaan 77industry yang memanfaatkan teknologi 77industry melalui jasa konsultasi	10 Persen	18,38 Persen	Jasa Konsultasi DAPATI (penganggaran kegiatan DAPATI 2022 berada pada DIPA Pusat OPTIKJI BSKJI)	0	0	-
		2. Meningkatnya utilitas layanan jasa industri di dalam negeri	2 Persen	41,37 Persen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jasa Pelayanan Teknis Kalibrasi. ▪ Layanan Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ▪ Layanan Pengujian Aneka Komoditi dan Produk Halal. ▪ Layanan Pengujian Pengendalian Pencemaran. ▪ Layanan Sertifikasi Produk. ▪ Layanan Sertifikasi Manajemen Lingkungan. 	4.714.538.000	4.701.468.023	99,72

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN ANGGARAN 2022
BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA PENCEGAHAN PENCEMARAN
INDUSTRI**

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Komponen	Anggaran (Rp)		
						Pagu	Realisasi	%
					<ul style="list-style-type: none"> ▪ Layanan Sertifikasi Industri Hijau. ▪ Layanan Audit Energi 			
		3. Peningkatan jumlah lingkup layanan jasa industri di dalam negeri	3 Lingkup jasa layanan	4 Lingkup Jasa Layanan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Koordinasi Peningkatan Layanan dan Operasional Laboratorium Pengujian ▪ Koordinasi Peningkatan Layanan dan Operasional Lembaga Sertifikasi. 	1.825.820.000	1.801.848.841	98,69
		4. Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	55 Persen	88,11 Persen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengadaan peralatan inventaris perkantoran ▪ Pelayanan Tata Usaha dan Rumah Tangga ▪ Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi. ▪ Pembangunan/renovasi Gedung dan Bangunan ▪ Pengadaan peralatan fasilitas laboratorium/workshop/layanan 	3.966.530.000	3.808.556.930	96,02
4	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditundaklanjuti oleh satker	92 %	100 %	▪ Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	28.540.000	27.952.303	97,94
5	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap jasa layanan industri	3.6	3.66	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelaksanaan pemasaran/promosi/pameran/publikasi layanan teknis. ▪ Pengelolaan Majalah/Jurnal Ilmiah dan Publikasi KTI 	300.660.000	293.610.624	97,66
6	Terwujudnya ASN BSKJI yang Profesional	1. Rata-rata indeks profesionalitas ASN	76	77,07	▪ Pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional	336.530.000	325.886.893	96,84

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN ANGGARAN 2022
BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA PENCEGAHAN PENCEMARAN
INDUSTRI**

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Komponen	Anggaran (Rp)		
						Pagu	Realisasi	%
					<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pendidikan dan Pelatihan teknis ▪ Pendidikan dan Pelatihan Teknis ASN 			
		2. Nilai Disiplin pegawai	82	83,10	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengelolaan/manajemen SDM ▪ Gaji dan Tunjangan 	14.147.380.000	14.102.415.082	99,68
7	Penguatan Sistem Informasi Terintegrasi, Kolaborasi dan Layanan Publik	Nilai minimal indeks layanan publik	A-	A	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengelolaan data dan Informasi. ▪ Pelaksanaan Reformasi Birokrasi/Zona Integritas/SPIP ▪ Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor. ▪ Langganan daya dan Jasa ▪ Operasional IPAL ▪ Operasional Perkantoran dan Pimpinan ▪ Pemeliharaan Alat Laboratorium ▪ Pemeliharaan kendaraan Operasional ▪ Pemeliharaan Sarana Kantor ▪ Pengadaan Bahan Makanan dan Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh 	5.610.920.000	5.324.912.000	94,90
8	Penguatan Akuntabilitas Organisasi	1. Nilai minimal akuntabilitas kinerja	81	81,65	Penyusunan rencana program dan anggaran	33.900.000	33.775.481	99,63
		2. Nilai minimal Laporan Keuangan	91	97	Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan	114.780.000	114.701.918	99,93

Realisasi keuangan dari tiap sasaran kegiatan dan indikator kinerja adalah sebagai capaian penggunaan anggaran dalam masing masing kegiatan.

Realisasi anggaran belanja/ penggunaan anggaran DIPA BBSPJPPI TA 2022 per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 30.939.394.417,- atau sebesar 98,25 % dari pagu DIPA 2022 sebesar Rp. 31.491.998.000,- dengan perincian sebagai berikut :

- Rupiah Murni (RM) : realisasi anggaran mencapai Rp. 16.436.919.759,- (99,70) dari pagu anggaran sebesar Rp. 16.486.998.000,-.
- PNBP : realisasi anggaran mencapai Rp. 14.502.474.658,- (96,65%) dari target rencana penggunaan anggaran PNBP sebesar Rp. 15.005.000.000,-.

Pada awal TA. 2022 telah disusun rencana realisasi anggaran untuk Realisasi Anggaran kegiatan BBSPJPPI Per Triwulan, adapun realisasi capaian per Triwulan sebagaimana ditampilkan pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.34. Realisasi Anggaran Kegiatan Per Triwulan Tahun 2022

Kegiatan/Klasifikasi Rincian Output	Anggaran (Rp 000)	Trw I (%)		Trw II (%)		Trw III (%)		Trw IV (%)		Realisasi (Rp)
		Keuangan		Keuangan		Keuangan		Keuangan		
		T	R	T	R	T	R	T	R	
	31.491.998							100	98,25	30.939.394.417
1 Pelayanan Publik Kepada Industri	6.952.758	18,69	18,69	29,70	29,50	33,75	33,90	29,41	32,08	6.907.582.536
2 Sarana Bidang Industri dan Perdagangan	1.500.000	-	-	-	-	12,30	12,30	87,70	84,97	1.459.197.200
3 Layanan Dukungan Manajemen Internal	19.772.420	15,95	14,11	26,54	31,58	20,81	26,11	33,45	30,34	19.441.324.039
4 Layanan Sarana dan Prasarana Internal	2.388.250	-	-	9,28	9,28	18,89	18,89	69,75	65,01	2.275.171.080
5 Layanan Manajemen SDM Internal	674.910	5,64	5,64	3,45	3,45	32,50	32,50	58,49	58,72	663.747.860
6 Layanan Manajemen Kinerja Internal	203.660	30,36	30,36	6,97	6,97	25,09	27,05	27,90	27,54	192.371.702

Tabel 3.35. Realisasi Anggaran Klasifikasi Rincian Output (KRO)
 BBSPJPPI Tahun 2022

KODE	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT	PAGU	REALISASI	%
6077.BAD	Pelayanan Publik kepada Industri	6.952.758.000	6.907.582.536	99,35
6077.CAH	Sarana Bidang Industri dan Perdagangan	1.500.000.000	1.459.197.200	97,28
6042.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	19.772.420.000	19.441.324.039	98,33
6042.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	2.388.250.000	2.275.171.080	95,27
6042.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	674.910.000	663.747.860	98,35
6042.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	203.660.000	192.371.702	94,46
	TOTAL	31.491.998.000	30.939.394.417	98,25

2. Analisis hasil yang telah dicapai

Realisasi anggaran Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPPI) tahun 2022 sebesar Rp. 30.939.394.417,- atau 98,25% dari total anggaran Rp. 31.491.998.000,-. Capaian realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan target realisasi keuangan yang ditetapkan BSKJI, dimana BSKJI menetapkan target realisasi keuangan satker di lingkungan BSKJI untuk tahun 2022 sebesar 96,62%.

Capaian realisasi anggaran BBSPJPPI sebesar 98,25% juga lebih tinggi dibandingkan dengan capaian realisasi Kementerian Perindustrian yang sebesar 97,29% dan capaian rata-rata realisasi nasional yang sebesar 93,32%.

Tabel 3.36. Perbandingan Capaian Realisasi Anggaran Tahun 2022

	Target (%)	Realisasi (%)
Nasional		93,32
Kementerian Perindustrian	98,05	97,29
BSKJI	96,62	97,29
BBSPJPPI	96,62	98,25

Adapun perbandingan realisasi anggaran BBSPJPPI dibandingkan dengan capaian realisasi satker di lingkungan BSKJI sebagai berikut

Tabel 3.37. Perbandingan capaian realisasi anggaran satker di lingkungan BSKJI

NO.	UNIT/SATUAN KERJA	TOTAL		
		PAGU	REALISASI	%
A	PUSAT	100.896.565	99.552.284	98,67
1	PUSAT PERUMUSAN, PENERAPAN DAN PEMBERLAKUAN STANDARDISASI INDUSTRI	8.020.804	7.920.221	98,75
2	PUSAT INDUSTRI HIJAU	12.928.910	12.769.261	98,77
3	SEKRETARIAT	49.253.784	48.795.487	99,07
4	PUSAT PENGAWASAN STANDARDISASI INDUSTRI	8.900.101	8.824.233	99,15
5	PUSAT OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INDUSTRI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI	21.792.966	21.434.075	98,35
B	BALAI BESAR INDUSTRI	359.536.934	353.578.154	98,34
1	BBSPJI KIMIA FARMASI DAN KEMASAN	67.999.706	67.834.097	99,76
2	BBSPJI AGRO	49.858.693	48.767.096	97,81
3	BBSPJI KERAMIK DAN MINERAL NON LOGAM	21.788.367	20.895.644	95,90
4	BBSPJI TEKSTIL	21.482.280	21.153.348	98,47
5	BBSPJI BAHAN DAN BARANG TEKNIK	44.660.773	43.929.060	98,36
6	BBSPJI SELULOSA	22.029.600	21.667.752	98,36
7	BBSPJI LOGAM DAN MESIN	25.628.027	24.790.337	96,73
8	BBSPJI KULIT, KARET DAN PLASTIK	23.101.279	22.512.578	97,45
9	BBSPJI KERAJINAN DAN BATIK	23.291.911	23.069.113	99,04
10	BBSPJ. PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI	31.491.998	30.887.806	98,08
11	BBSPJI HASIL PERKEBUNAN MINERAL LOGAM DAN MARITIM	28.204.300	28.071.323	99,53
C	BARISTAND INDUSTRI. BSI & BPSI	190.139.721	182.668.954	96,07
1	BSPJI BANDA ACEH	14.217.006	14.201.514	99,89

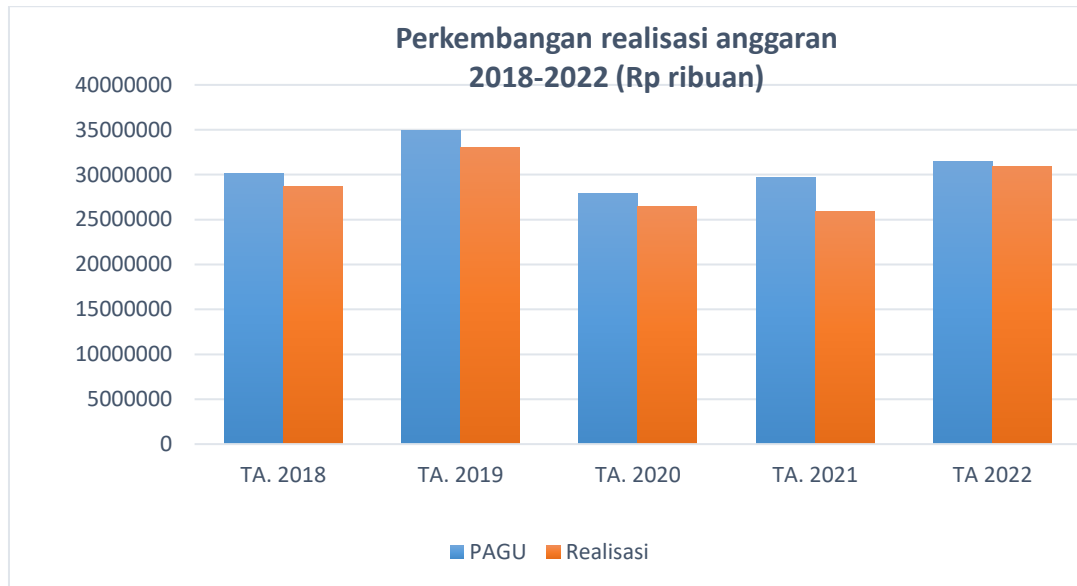
NO.	UNIT/SATUAN KERJA	TOTAL		
		PAGU	REALISASI	%
2	BSPJI MEDAN	16.545.446	14.682.571	88,74
3	BSPJI PADANG	14.618.540	14.292.151	97,77
4	BSPJI PALEMBANG	14.806.645	13.952.840	94,23
5	BSPJI BANDAR LAMPUNG	16.798.076	15.185.701	90,40
6	BSPJI SURABAYA	26.914.023	26.807.109	99,60
7	BSPJI BANJARBARU	15.382.687	15.300.838	99,47
8	BSPJI PONTIANAK	12.814.360	11.556.575	90,18
9	BSPJI SAMARINDA	15.024.585	14.948.866	99,50
10	BSPJI MANADO	11.603.799	11.068.093	95,38
11	BSPJI AMBON	9.960.918	9.768.053	98,06
12	BSPJI JAKARTA	14.597.480	14.073.157	96,41
13	BSPJI PEKANBARU	6.856.156	6.831.486	99,64

Capaian realisasi keuangan BBSPJPPI TA 2022 juga merupakan capaian realisasi tertinggi selama kurun waktu periode 5 (lima) tahun terakhir

Tabel 3.38. Perkembangan Realisasi Anggaran TA. 2018-2022

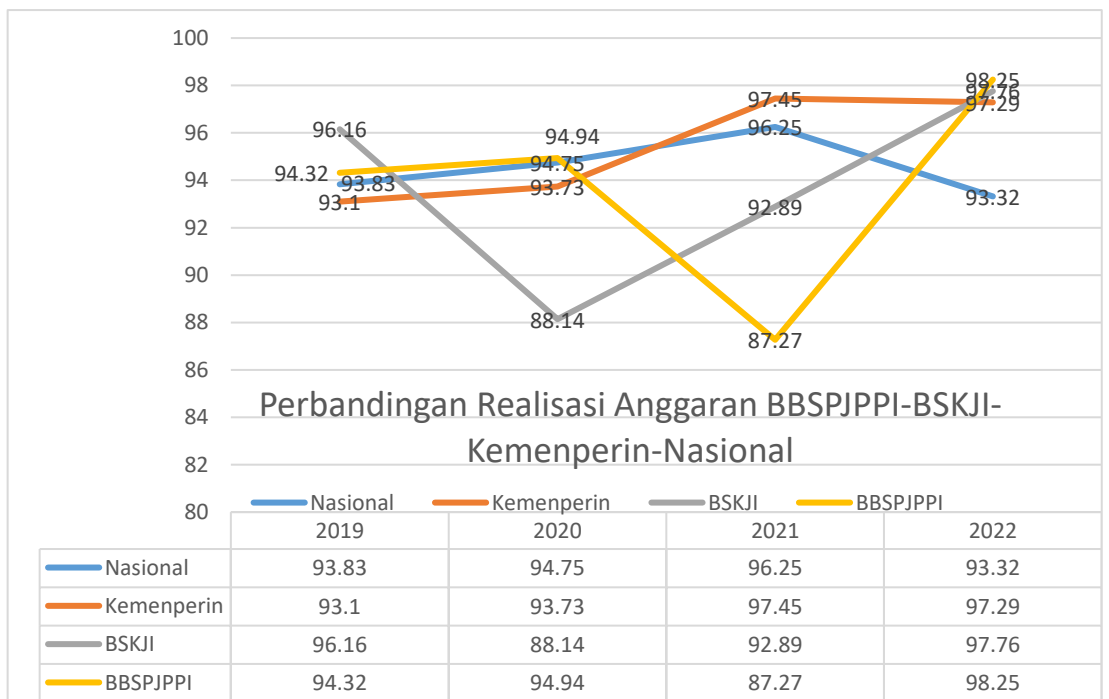
	TA. 2018	TA. 2019	TA 2020	TA 2021	TA 2022
PAGU (Rp. Ribu)	30.101.437	34.972.308	27.876.798	29.686.788	31.491.998
Realisasi (Rp. Ribu)	28.655.029	32.985.880,906	26.464.865,165	25.907.016,415	30.939.394
Realisasi(%)	95,20	94,32	94,94	87,27	98,25

Grafik 3.1 Perkembangan Realisasi Anggaran TA. 2018 - 2022



Sementara itu persentase capaian realisasi anggaran Nasional, Kementerian Perindustrian, BSKJI, dan BBSPJPPI selama periode tahun 2018 sampai 2022 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Grafik 3.2.
 Capaian Realisasi Anggaran Nasional, Kemenperin, BSKJI dan BBSPJPPI 2019-2022



Adapun capaian realisasi DIPA BBSPJPPI TA 2022 per sumber anggaran baik Rupiah Murni maupun PNPB tahun berjalan sebagai berikut:

3.2.1.1 Realisasi Anggaran Keuangan (RM)

a) Hasil yang telah dicapai

Realisasi anggaran Rupiah Murni sebesar Rp 16.436.919.759 atau 99,70 % dari pagu anggaran Rupiah Murni sebesar Rp. 16.486.998.000,- dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.39. Realisasi anggaran bersumber Rupiah Murni

KODE	PROGRAM / KRO	PAGU	REALISASI	%
WA	Pogram Dukungan Manajemen			
6042.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal			
994	Layanan Perkantoran	16.486.998.000	16.436.919.759	99,70
001	Gaji dan Tunjangan	13.809.000.000	13.764.554.115	99,68
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	2.677.998.000	2.672.365.644	99,79

Realisasi pada sumber anggaran Rupiah Murni BBSPJPPI TA 2022 telah melebihi target realisasi yang ditetapkan BSKJI.

b) Kendala

Masih terdapat sisa anggaran Rupiah Murni yang berasal dari sisa anggaran belanja pegawai pada pos belanja uang makan dikarenakan penyerapan anggaran mempertimbangkan tingkat kehadiran pegawai. Selain itu pada anggaran operasional dan pemeliharaan kantor masih terdapat sisa anggaran yang berasal dari belanja langganan dan daya karena realisasi dipengaruhi oleh jumlah tagihan berdasarkan tingkat penggunaan.

c) Rekomendasi

Untuk mengoptimalkan realisasi anggaran pada sumber anggaran Rupiah Murni pada pelaksanaan anggaran tahun berikutnya, di periode akhir tahun anggaran perlu dilakukan identifikasi potensi sisa anggaran yang tidak terealisasi pada setiap kegiatan dan untuk selanjutnya dapat dilakukan realokasi anggaran dalam rangka mendukung optimasi kinerja penyerapan anggaran.

3.2.1.2 Realisasi Anggaran PNBPN Tahun Berjalan

a) Hasil yang telah dicapai

Pada Tahun Anggaran 2022 realisasi anggaran pada sumber anggaran PNBPN tahun berjalan sebesar Rp. 14.502.474.658,- atau 96,65 % dari total anggaran PNBPN tahun berjalan yang sebesar Rp. 15.005.000.000,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.40. Realisasi Anggaran Bersumber PNBPN Tahun Berjalan

KODE	PROGRAM / KRO	PAGU	REALISASI	%
EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri			
6077.BAD	Pelayanan Publik kepada Industri	6.952.758.000	6.907.582.536	99,35
6077.CAH	Sarana Bidang Industri dan Perdagangan	1.500.000.000	1.459.197.200	97,28
WA	Program Dukungan Manajemen			
6042.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	3.285.422.000	3.004.404.280	91,45
6042.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	2.388.250.000	2.275.171.080	95,27
6042.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	674.910.000	663.747.860	98,35
6042.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	203.660.000	192.371.702	94,46
	Total	15.005.000.000	14.502.474.658	96,65

Realisasi pada sumber anggaran PNBPN Tahun Berjalan BBSJPPI TA 2022 telah melebihi target realisasi yang ditetapkan BSKJI.

b) Kendala

- 1) Pengadaan sarpras internal tahun 2022 menggunakan sumber anggaran PNBPN yang realisasi pelaksanaannya memerlukan kepastian ketersediaan anggaran terlebih dahulu yang berasal dari realisasi penerimaan PNBPN tahun berjalan. Berdasarkan capaian realisasi penerimaan PNBPN tahun 2022 yang tidak tercapai 100% (98,7 % dari target) serta mempertimbangkan skala prioritas kebutuhan, maka paket pengadaan barang untuk perangkat pengolahan data tidak seluruhnya direalisasikan dimana penganggaran diprioritaskan terlebih dahulu untuk pelaksanaan pekerjaan renovasi bangunan gedung BBSJPPI dan pengadaan peralatan uji laboratorium.

- 2) Terdapat sisa anggaran yang tidak terealisasi pada kegiatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi/Zona Integritas/SPIP untuk belanja jasa pembuatan video penilaian inovasi pelayanan dikarenakan pada proses Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik/SINOVIK tahun 2022, BBSPJPPI belum berhasil lolos pada tahap seleksi administrasi.

c) Rekomendasi

- 1) Perlu dilakukan analisa kebutuhan pengadaan perangkat pengolah data yang belum terealisasi di tahun 2022. Apabila masih diperlukan dan belum tersedia alokasi anggaran maka dapat dilakukan revisi anggaran untuk proses pengadaannya.
- 2) Pada pelaksanaan anggaran tahun berikutnya, di periode akhir tahun anggaran perlu dilakukan identifikasi potensi sisa anggaran yang tidak terealisasi pada setiap kegiatan dan untuk selanjutnya dapat dilakukan realokasi anggaran dalam rangka mendukung optimasi kinerja penyerapan anggaran.

3.2.2 Realisasi Penerimaan PNBP

1) Hasil yang telah dicapai

Pada tahun 2022, aktivitas layanan telah kembali berjalan normal dimana kapasitas layanan telah mendekati kondisi normal sebelum masa pandemi. Hal ini berdampak pada realisasi penerimaan PNBP dari layanan jasa teknis yang sd periode 31 Desember 2022 memperoleh realisasi penerimaan sebesar Rp. 14.809.403.248,- atau 94,67% dari target penerimaan PNBP yang sebesar Rp. 15.005.000,-. Komposisi penerimaan PNBP pada satker BBSPJPPI masih belum proporsional untuk semua jenis layanan. Komposisi penerimaan jasa layanan utamanya masih ditopang dari jasa layanan pengujian (penanganan pencemaran, pengujian bahan dan barang, standarisasi pengujian mutu produk) dan layanan sertifikasi. Sementara realisasi terendah diperoleh dari pemberian jasa layanan kalibrasi.

Sementara ditinjau dari realisasi penggunaan, belanja yang bersumber dari sumber anggaran PNBP tercatat sebesar Rp. 14.502.474.658,- atau 96,65% dari pagu anggaran PNBP tahun berjalan. Realisasi belanja PNBP dipengaruhi oleh tingkat realisasi

penerimaan PNBP yang berasal dari realisasi pemberian jasa layanan pada tahun berjalan.

Tabel 3.41. Pagu dan Realisasi PNBP Tahun 2022

Pagu	2022
Target Penerimaan (Rp)	15.005.000.000
Realisasi Penerimaan (Rp)	14.809.403.248
Realisasi Penerimaan (%)	98,69
Pagu Penggunaan (Rp)	15.005.000.000
Realisasi Penggunaan (Rp)	14.502.474.658
Realisasi Penggunaan (%)	96,65

2) Analisis hasil yang telah dicapai

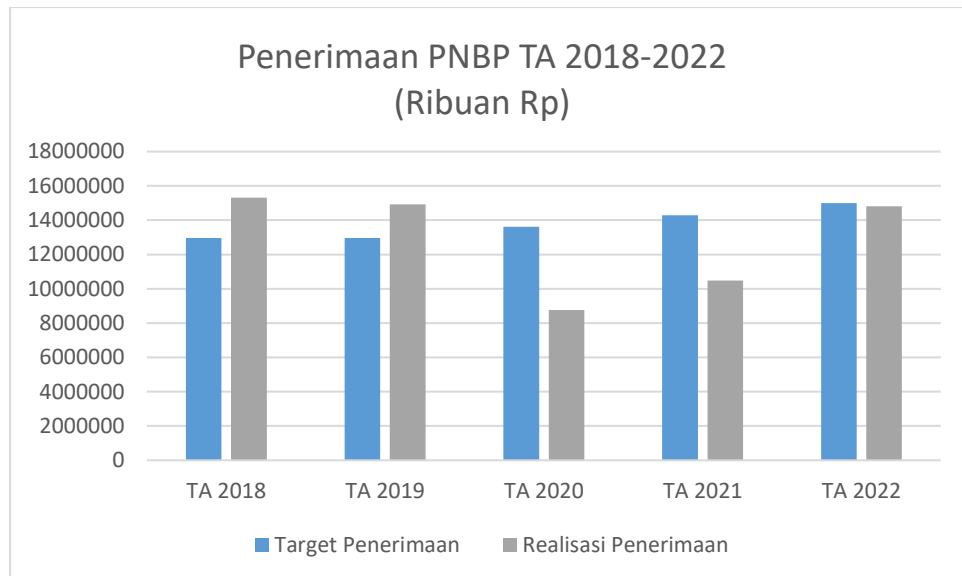
Tabel 3.42. Realisasi Penerimaan dan Realisasi Penggunaan

Sumber Anggaran PNBP

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Target Penerimaan (Rp.000)	12.962.436	12.962.436	14.987.778	14.292.000	15.005.000
Realisasi Penerimaan (Rp.000)	15.322.170	14.931.110	8.770.372	10.475.231	14.809.403
Realisasi Penerimaan (%)	118,20	115,19	58,51	73,29	98,69
Pagu Belanja (Rp.000)	14.069.182	17.962.436	13.610.557	13.773.243	15.005.000
Realisasi Penggunaan (Rp.000)	13.999.797 *	16.265.023 **	12.955.567 ***	10.300.884	14.502.474
Realisasi Penggunaan thp Penerimaan (%)	91,36	108,93	147,71	98,33	97,92
Realisasi Penggunaan thp Pagu Belanja (%)	99,50	90,55	95,18	74,49	96,65

Grafik 3.3

Penerimaan PNBP Tahun Anggaran 2018-2022



Realisasi penerimaan PNBP selama periode 2020-2021 masih dipengaruhi adanya kejadian luar biasa akibat Pandemi Covid-19. Meskipun demikian, realisasi penerimaan di tahun 2021 menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya dimana pada periode tahun 2020 aktivitas perkantoran dan layanan masih sangat dibatasi dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 yang menyebabkan aktivitas layanan belum dapat beroperasi pada kapasitas optimalnya.

Pada tahun 2021, dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat di seluruh area lingkungan perkantoran dan adanya upaya perlindungan atas infeksi Virus Covid-19 melalui proses vaksinasi untuk keseluruhan karyawan yang telah selesai dilakukan per medio Juni 2021, membuat aktivitas layanan selepas Semester II 2021 telah berangsur meningkat mendekati kapasitas optimalnya sehingga turut berdampak pada peningkatan sumber penerimaan PNBP balai dibanding periode sebelumnya.

Sementara pada tahun 2022, sejak awal tahun aktivitas layanan telah kembali beroperasi secara normal sebagaimana kondisi sebelum masa pandemi sehingga hal ini berdampak pada tingkat capaian realisasi penerimaan PNBP.

Tabel 3.43. Perbandingan realisasi target dan penerimaan PNBPN Tahun 2022 Satker
BLU di lingkungan BSKJI

Satker BLU	Target PNBPN (dalam ribuan Rp)	Realisasi PNBPN (dalam ribuan Rp)
BBSPJPPI	15.005.000	14.809.403
BBSPJB4T	32.550.000	60.288.330
BBSPJIA	33.615.000	33.372.454
BSPJI Lampung	7.250.000	5.115.053

Tabel 3.44. Penerimaan PNBPN sesuai Jasa Pelayanan teknis TA 2018-2022

No	Uraian	Penerimaan PNBPN (Rp. 000)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Optimalisasi Pemanfaatan teknologi	1.794.973	1.295.660	1.746.345	2.007.916	2.840.699
2	Pelatihan Teknik Operasional	176.500	69.350	54.997	103.552	211.470
3	Pengujian Bahan & Barang	1.268.118	1.056.047	1.669.102	1.672.654	1.213.742
4	Konsultasi Keteknikan	-	6.000	92.685	-	87.930
5	Standardisasi Penguji Mutu Produk	679.725	677.721	571.941	958.704	1.182.843
6	Kalibrasi	111.253	77.515	34.402	19.113	64.420
7	Sertifikasi Sistem Mutu	1.636.097	1.657.297	1.167.612	1.728.717	1.829.718
8	Rancang Bangun & Perekayasaan	314.007	359.086	268.142	250.305	180.060
9	Penanganan Pencemaran	8.695.342	9.313.835	2.963.028	3.672.745	7.114.214
10	Jasa Kegiatan Lainnya	451.117	198.754	15.824	45.666	12.294
	Jasa Giro BLU	195.039	218.082	186.291	15.857	72.009
	JUMLAH	15.322.171	14.929.346	8.770.372	10.475.231	14.809.403

Berdasarkan data histori penerimaan selama periode 2018-2022, penerimaan layanan tertinggi dicapai di tahun 2018 sementara capaian terendah pada tahun 2020 dimana pada saat tersebut merupakan masa awal pandemi Covid-19. Penerimaan tahun 2022 sendiri telah tercapai mendekati kondisi penerimaan pada saat layanan berjalan normal sebelum masa pandemi.

Realisasi penerimaan PNBPN satker BBSPJPPI selama 5 (lima) tahun terakhir masih utamanya ditopang dari layanan jasa teknis pengujian (penanganan pencemaran, pengujian bahan dan barang, standarisasi pengujian mutu produk)

Tabel 3.45 .Jumlah Pelanggan 2018-2022

No	Jenis JPT	Jumlah Pelanggan									
		2018		2019		2020		2021		2022	
		Industri	Non Industri	Industri	Non Industri	Industri	Non Industri	Industri	Non Industri	Industri	Non Industri
1	Optimalisasi Pemanfaatan teknologi	9		9	-	5	-	2	-	-	-
2	RBPI/Rancangan Bangun Perekayasaan Industri (Jumlah RBPI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Pelatihan	7		3	11	5	2	7	8	4	8
4	Pengujian	837		757		357	92	440	123	475	172
6	Konsultasi/Supervisi (Jumlah Konsultasi/Supervisi) jasa alih teknologi penelitian dan pengembangan	10		4		5	-	2	-	3	1
7	Kalibrasi (Sertifikat/Alat)	15		29		12	1	23	1	21	3
8	Sertifikasi	186	-	212	-	155	-	207	-	217	-
9	Audit Energi	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabel 3.46. Jumlah Sampel/Alat/Sertifikat/Pelatihan/Riset/Konsultasi Tahun 2018-2022

No	Jenis JPT	Jumlah Sampel/Alat/Sertifikat/Pelatihan/Riset/Konsultasi				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi	9	9	5	2	-
2	RBPI/Rancang Bangun Perekayasaan Industri (Jumlah RBPI)	-	-	-	-	-
3	Pelatihan					
	a. Jumlah pelatihan	7	14	7	15	12
	b. Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan	84	167	105	152	193
4	Pengujian					
	a. Jumlah Pelanggan	837	757	449	563	647
	b. Jumlah sampel uji	9486	10829	4036	6986	7323
6	Konsultansi/Supervisi (Jumlah Konsultansi/ Supervisi) (jasa alih teknologi penelitian dan pengembangan)	10	4	5	2	4
7	Kalibrasi (Sertifikat/Alat)					
	a. Jumlah pelanggan	15	29	13	24	24
	b. Jumlah alat	90	123	87	134	147
8	Sertifikasi					
	a. Jumlah pelanggan	186	212	155	207	217
	b. Jumlah sertifikat	168	174	91	167	167

Grafik 3.4. Jumlah Pelanggan per Jenis Layanan Teknis 2018-2022



Dari grafik diatas, jumlah pelanggan jasa layanan teknis BBSJPPI yang tertinggi berasal dari layanan jasa Pengujian dan yang kedua pada jasa layanan sertifikasi.

3) Kendala

- Seiring dengan adanya pembatasan penerimaan sampel selama periode masa pandemi menyebabkan sebagian pelanggan layanan pengujian beralih ke laboraorium pengujian kompetitor
- Masih terdapat piutang yang belum tertagih di tahun 2022 dikarenakan belum selesainya administrasi untuk proses penagihan pada pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan di akhir tahun khususnya untuk kontrak kerjasama pemantauan lingkungan yang pelaksanaan pekerjaan baru diselesaikan pada akhir 2022 sehingga pembayaran oleh pelanggan diperkirakan baru dapat dilakukan pada awal 2023.

4) Rekomendasi

Rencana perbaikan pada tahun selanjutnya dalam mendorong peningkatan realisasi penerimaan PNBP sebagai berikut:

- Mengoptimalkan upaya penerimaan PNBP melalui pengembangan kapasitas jasa layanan (pengembangan lingkup layanan baru diantaranya sertifikasi halal, verifikasi GRK, verifikasi TKDN, uji profisiensi) serta peluang sumber penerimaan baru dengan mendorong komersialisasi produk inovasi teknologi yang dimiliki BBSPJPPI (teknologi AiMS, dll).
- Melakukan monitoring piutang dan penyelesaian tagihan pembayaran piutang atas jasa layanan untuk memperlancar cash flow dan memberi kelonggaran operasional kegiatan yang bersumber dari sumber anggaran PNBP. Kedepannya perlu dilakukan koordinasi intensif antara bagian keuangan dengan bagian teknis yang memudahkan penyampaian kelengkapan dokumen penagihan ke pelanggan
- Memperluas pemberian layanan kepada pelanggan melalui upaya peningkatan jumlah ruang lingkup akreditasi untuk layanan eksisiting (rencana penambahan 3 ruang lingkup akreditasi di tahun 2023).
- Segera berkoordinasi baik dengan unit internal Kemenperin (BSKJI, Biro Keuangan) maupun dari pihak eksternal (Dit. PPK BLU) untuk pembahasan usulan perubahan tarif jasa layanan BLU BBSPJPPI
- Melakukan pendekatan kepada pelanggan yang telah beralih ke kompetitor dengan menawarkan keunggulan jasa layanan BBSPJPPI

3.3. Analisis Efisiensi

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran

Dalam melaksanakan Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dan Program serta Dukungan Manajemen untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan pada Tahun Anggaran 2022 secara umum efisiensi yang telah dilaksanakan antara lain ;

- a. Analisis Efisiensi berdasarkan Penggunaan Sumber Daya Anggaran
Berdasarkan target dan capaian Klasifikasi Rincian Output serta pagu dan realisasi anggaran TA 2022, maka dapat dihitung efisiensi sebagai berikut :

Tabel 3.47. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	KRO	KRO		Anggaran		Rasio Realisasi Anggaran terhadap Realisasi KRO (5)=(4)/(2)	Rasio Pagu Anggaran terhadap Target KRO (6)=(3)/(1)	Perbandingan (7)=(5)/(6)	% Efisiensi (8)= 1-(7)*100%	Rata-rata % Efisiensi
		Target	Realisasi	Pagu	Realisasi					
		(1)	(2)	(3)	(4)					
1	Pelayanan Publik kepada Industri	771	722	6952758000	6907582536	9,567,288.83	9,017,844	1.061	-6.09%	3.51%
2	Sarana Bidang Industri dan Perdagangan	18	18	1500000000	1459197200	81,066,511.11	83,333,333	0.973	2.72%	
3	Layanan Dukungan Manajemen Internal	3	3	19772420000	19441324039	6,480,441,346.33	6,590,806,667	0.983	1.67%	
4	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	2	2	2388250000	2275171080	1,137,585,540.00	1,194,125,000	0.953	4.73%	
5	Layanan Manajemen SDM Internal	234	263	674910000	663747860	2,523,756.12	2,884,231	0.875	12.50%	
6	Layanan Manajemen Kinerja Internal	12	12	203660000	192371702	16,030,975.17	16,971,667	0.945	5.54%	

Secara keseluruhan, berdasarkan penggunaan sumber daya anggaran, rata-rata efisiensi yang dilakukan oleh Satker BBSJPPI adalah sebesar 3,51 %. Angka rata-rata efisiensi ini menunjukkan bahwa pada Satker BBSJPPI secara umum realisasi anggaran lebih kecil dari pagu yang direncanakan untuk mencapai target, sehingga terjadi efisiensi sebesar 3,51 %.

b. Efisiensi Anggaran Berdasarkan Aplikasi SMART

Berdasarkan aplikasi SMART Kementerian Keuangan, pada tahun 2022 nilai kinerja Satker BBSPJPPI adalah sebesar 74,43. Dari Dashboard tersebut didapatkan informasi bahwa terdapat efisiensi pada pelaksanaan anggaran Satker TA 2022 dengan nilai efisiensi kinerja anggaran sebesar -6,58%

Tabel 3.48. Nilai Kinerja Berdasarkan Aplikasi SMART DJA

No	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	Kinerja	Penyerapan	Konsistensi	CRO	Efisiensi
1	539081	BSPJI SAMARINDA	99,7	99,49	98,61	100	20
2	539053	BSPJI PADANG	99,52	97,77	98,57	100	20
3	015118	BSPJI JAKARTA	99,11	96,41	97,04	100	20
4	417912	BSPJI PEKANBARU	97,6	99,64	98,26	100	17,14
5	248920	BSPJI PALEMBANG	97,06	94,23	86,92	100	20
6	247225	BSPJI MEDAN	92,73	88,74	98,42	100	11,75
7	539074	BSPJI PONTIANAK	91,33	90,18	83,94	100	13,3
8	247211	BSPJI SURABAYA	90,45	99,6	99,85	100	6,74
9	247403	BBSPJI HPMM	89,51	99,53	98,78	100	5,7
10	248035	BSKJI	89,25	98,67	99,18	100	5,35
11	247246	BSPJI MANADO	89,11	95,38	96,63	100	6,26
12	247157	BBSPJI KMN	89,1	95,9	98,69	100	5,64
13	247199	BBSPJI KKP	88,5	97,45	99,42	100	4,4
14	247232	BSPJI BANJARBARU	88,04	99,47	99,96	100	3,35
15	247204	BBSPJI KB	87,58	99,04	99,76	100	2,81
16	248042	BBSPJIT	87,37	98,47	99,58	100	2,66
17	248145	BSPJI AMBON	87,19	98,06	97,29	100	3,04
18	247136	BBSPJIA	86,94	97,81	99,38	100	2,19
19	248060	BBSPJILM	86,1	96,73	87,12	100	4,29
20	248056	BBSPJIS	85,49	98,36	87,05	100	3,22
21	248124	BSPJI BANDA ACEH	85,12	99,89	87,03	100	2,5
22	539060	BSPJI LAMPUNG	84,91	90,4	66,68	99,26	9,13
23	247140	BBSPJIBBT	83,88	98,36	67,03	100	6,07
24	412528	BBSPJIKFK	82,73	99,76	99,98	93,99	-0,47
25	247161	BBSPJPPI	74,43	98,08	99,43	85,58	-6,58

c. Analisis Tingkat Keberhasilan Pelaksanaan Program

Berdasarkan capaian target Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama pada Dokumen Rencana Strategis, capaian target Perjanjian Kinerja, serta realisasi fisik dari penyerapan anggaran tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 3.49. Pencapaian Target Kinerja Satker TA 2022

No	Dokumen Kinerja	Capaian Rata-rata	Jumlah IK	IK Tercapai	IK Tidak Tercapai	Rasio Tingkat Keberhasilan IK 2022
TAHUN ANGGARAN 2022						
1	Perjanjian Kinerja	110.00%	13	13	0	100.00%
2	Rencana Strategis	110.00%	13	13	0	100.00%
3	Indikator Kinerja Utama	117.00%	6	6	0	100.00%
4	Realisasi Fisik	100.00%	-	-	-	100.00%
	Rata-rata	109.25%	32	32	0	100.00%

Berdasarkan tabel 3.48, rasio tingkat keberhasilan pencapaian target-target kinerja Satker BBSPJPPI TA 2022 adalah 100% dengan rata-rata capaian mencapai 109,25%.

3.4. Penghargaan dari Luar instansi

a) Penghargaan Internal

-

b) Penghargaan Eksternal

Pada Tahun 2022, BBSPJPPI mengikuti seleksi Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang diikuti 81 Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah. Mekanisme evaluasi terkait perhitungan indeks layanan publik mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2017.

Adapun hasil evaluasi berdasarkan keputusan Menteri PAN & RB Nomor 1035 Tahun 2022 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kementerian, Lembaga, Dan Pemerintah Daerah Tahun 2022,

unit pelayanan publik BBSPJPI ditetapkan sebagai salah satu unit yang berhasil menerapkan pelayanan prima dengan indeks nilai 4,58 (kategori A).



atas peraih BBSPJPI sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori **PELAYANAN PRIMA** lingkup Kementerian/ Lembaga tahun 2022 oleh KemenPANRB

BBSPJPI Kemenperin | BBSJPI Kemenperin | @BSPJPI_Kemenperin | @BSPJPI_Kemenperin | 082134525006



KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1035 TAHUN 2022

TENTANG
HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PUBLIK DI KEMENTERIAN, LEMBAGA, DAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik pada unit penyelenggaraan pelayanan publik lingkup kementerian, lembaga dan pemerintah daerah tahun 2022, perlu menetapkan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan dimaksud;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang

4

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI
NOMOR 1035 TAHUN
TENTANG
HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI
KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PUBLIK DI KEMENTERIAN, LEMBAGA DAN
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022

HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PUBLIK DI KEMENTERIAN, LEMBAGA,
DAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022

A. KEMENTERIAN/LEMBAGA

NO.	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	UNIT PELAYANAN PUBLIK	INDEKS	KATEGORI
1.	Badan Pusat Statistik	Pelayanan Statistik Terpadu, Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan	4,75	A
2.	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Pelayanan Perizinan Penyelenggaraan Telekomunikasi, Direktorat Telekomunikasi	4,62	A
3.	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Makassar	4,58	A
4.	Kementerian Perindustrian	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri Semarang	4,58	A
5.	Badan Narkotika Nasional	Balai Rehabilitasi Tanah Merah di Provinsi Kalimantan Timur	4,57	A
6.	Badan Pengawas Obat dan Makanan	Balai Besar POM di Yogyakarta	4,56	A
7.	Lembaga Administrasi Negara	Politeknik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi, Lembaga Administrasi Negara Bandung	4,56	A
8.	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Perizinan Ketenagalistrikan dan Pengaduan konsumen listrik, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan	4,56	A

BAB. IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPPI) pada tahun 2022 telah melaksanakan kegiatan Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri dan kegiatan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri sesuai dengan Rencana Kinerja yang disusun.

Pada tahun 2022, dalam rangka perwujudan pelaksanaan akuntabilitas kinerja BBSPJPPI telah menetapkan 8 (delapan) Sasaran Strategis dan 13 (tiga belas) Indikator Kinerja yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (Perkin) BBSPJPPI TA 2022. Seluruh target kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja dapat tercapai.

Untuk mendukung pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja, pada tahun 2022 memperoleh alokasi pagu anggaran awal sebesar Rp. 31.694.022.000,- yang dalam pelaksanaannya mengalami 11 (sebelas) kali proses revisi anggaran. Berdasarkan pengesahan DIPA revisi terakhir, anggaran BBSPJPPI mengalami perubahan menjadi Rp. 31.491.998.000,- yang terdiri dari anggaran Rupiah Murni sebesar Rp. 16.486.998.000,- dan anggaran PNBP tahun berjalan sebesar Rp. 15.005.000.000,-.

Secara keseluruhan capaian realisasi anggaran satker BBSPJPPI TA 2022 sebesar Rp. 30.939.394.417,- atau 98,25% dari seluruh total pagu anggaran dengan perincian realisasi anggaran Rupiah Murni mencapai Rp. 16.436.919.759,- (99,70%) dan realisasi anggaran PNBP tahun berjalan sebesar Rp. 14.502.474.658,- (96,65%) dari target rencana penggunaan anggaran PNBP sebesar Rp. 15.005.000.000,-.

Realisasi penerimaan PNBP satker BLU BBSPJPPI tahun 2022 sebesar Rp. 14.809.403.248,- atau sebesar 98,69% dari target penerimaan yang ditetapkan sebesar Rp. 15.005.000.000,-. Realisasi tersebut berdasarkan pelaksanaan pemberian layanan jasa teknis kepada 720 pelanggan industri dan 183 pelanggan non industri. Komposisi penerimaan PNBP utamanya masih ditopang dari layanan jasa pengujian yang

berkontribusi sebesar 82,3% dan layanan sertifikasi 12,2% dari total penerimaan di tahun 2022.

4.2. Permasalahan dan Kendala

Capaian Kinerja untuk Sasaran Strategis BBSPJPPI mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja 2022.

Beberapa hal yang masih berpengaruh pada tingkat capaian realisasi keuangan TA 2022 khususnya pada sumber anggaran PNBPN tahun berjalan diantaranya adalah tingkat capaian penerimaan PNBPN. Berdasarkan capaian realisasi penerimaan PNBPN tahun 2022 yang tidak tercapai 100% (98,69% dari target) serta mempertimbangkan skala prioritas kebutuhan, maka terdapat pengadaan sarpras internal tahun 2022 (paket pengadaan barang untuk perangkat pengolahan data) tidak seluruhnya direalisasikan dimana penganggaran diprioritaskan terlebih dahulu untuk pelaksanaan pekerjaan renovasi bangunan gedung BBSPJPPI dan pengadaan peralatan uji laboratorium.

Adapun kendala pencapaian target PNBPN dikarenakan masih terdapat proses administrasi penagihan untuk pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan di akhir tahun khususnya untuk kontrak kerjasama pemantauan lingkungan yang pelaksanaan pekerjaan baru diselesaikan pada akhir 2022 sehingga pembayaran oleh pelanggan diperkirakan baru dapat dilakukan pada awal 2023.

4.3. Saran dan Rekomendasi

Upaya untuk mengoptimalkan upaya penerimaan PNBPN dapat dilakukan melalui pengembangan kapasitas jasa layanan (pengembangan lingkup layanan baru diantaranya sertifikasi halal, verifikasi GRK, verifikasi TKDN, uji profisiensi) serta peluang sumber penerimaan baru dengan mendorong komersialisasi produk inovasi teknologi yang dimiliki BBSPJPPI (teknologi AiMS, dll). Tindak lanjut pengajuan usulan perubahan tarif BLU BBSPJPPI perlu segera dilakukan dengan berkoordinasi baik dengan unit internal Kemenperin (BSKJI, Biro Keuangan) maupun dengan pihak eksternal (Dit. PPK BLU). Untuk mendorong capaian realisasi penerimaan PNBPN tahun berjalan juga dapat dilakukan dengan melakukan monitoring piutang dan penyelesaian tagihan pembayaran piutang atas jasa layanan, kedepannya perlu dilakukan koordinasi intensif antara bagian keuangan dengan bagian teknis yang dapat memudahkan penyampaian kelengkapan dokumen penagihan ke pelanggan.

Sementara itu untuk mendorong realisasi anggaran, pada pelaksanaan anggaran tahun selanjutnya, di periode akhir tahun anggaran perlu dilakukan identifikasi potensi sisa anggaran yang tidak terealisasi pada setiap kegiatan dan untuk selanjutnya dapat dilakukan realokasi anggaran dalam rangka mendukung optimasi kinerja penyerapan anggaran.

RENCANA AKSI TRIWULAN IV TA.2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Triwulan IV	
				Target Fisik(%)	Rencana Kegiatan
				1	2
1	Meningkatnya daya saing industri pengalihan non migas	Peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri	1 Kolaborasi	100	Penyusunan Laporan
2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	Peningkatan peran Balai dalam pengembangan industri	4 Perusahaan	100	Penyediaan Korjasama sesuai SPK
3	Meningkatnya kemampuan industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	1. Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi 2. Meningkatnya utilitas layanan jasa industri di dalam negeri	10 Porsen 2 Porsen	100 100	Pertusunan dan Proses Pelaporan 1. Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPPPI 2. Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan 3. Pemberian Jasa layanan teknis ke industri dalam negeri sesuai permintaan yang disepakati.
		3.Peningkatan jumlah lingkup layanan jasa industri di dalam negeri	3 Ruang Lingkup	100	Perbaikan temuan dan Menunggu penerbitan surat akreditasi PRL oleh KAN .
		4.Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	58 Porsen	100	Penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa pada akun 521211 ; 521219; 521811; 522192; 524114; 521111 ; 521131; 522141; 524119; 522131; 522191; 521241; 521841; 532111; 533111
4	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditundalandan juti oleh satker	92%	100	Koordinasi dengan Setjen untuk memonitoring penerbitan surat penyelesaian hasil pengawasan
5	Terseleenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap jasa layanan industri	3,6	100	1. Perangsan dan penuntasan komplain/keuhan pelanggan. 2. Evaluasi dan penghitungan statistisi penilaian IKM, dengan target capaian IKM 3,6. 3. Unhuasi akhir dan pelaporan
6	Terwujudnya ASN BSKJI yang Profesional	1.Rata-rata indeks profesionalitas ASN	76	100	Fasilitasi dan monitoring realisasi diklat 20 JPL dan workshop/Bimtek/Seminar/Webinar.
		2.Nilai Disiplin pegawai	82	100	1. Mengingatkan setiap pegawai untuk log in pada jam masuk dan log out pada jam pulang di intranet (setiap jam kerja). 2. Evaluasi bulanan capaian nilai satker.
7	Penguatan Layanan Publik	Nilai minimal indeks layanan publik	A-	100	1. Tersedia dan terselenggaranya Standar Pelayanan (SP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Pemutakhiran/update sistem informasi digital secara berkala memuat proses bisnis, informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. 3. Informasi layanan publik tersaji pada desk layanan publik, website dan medsos. 4. Terselenggaranya Informasi dan promosi layanan BBSPPPI melalui OASIS , BG dan FGD. 5. Update Standar pelayanan dan pengelolaan informasi public (SK, Banner/leaflet, website dan Sistem Informasi). 6. Fast respon terhadap complain/keuhan pelanggan/saran dan masukan.
8	Penguatan Akuntabilitas Organisasi	1.Nilai minimal akuntabilitas kinerja	81	100	Pelaksanaan monev kinerja dan penyusunan dokumen akuntabilitas kinerja tahun berjalan (PP 39 Tw IV dan LAKIP).
		2.Nilai minimal laporan keuangan	91	100	1. Penyusunan laporan keuangan Semester II periode tahun berjalan. 2. Koordinasi penyusunan laporan keuangan Semester II periode tahun berjalan dengan bagian keuangan Ses DISKJI 3. Review laporan keuangan Semester II periode tahun berjalan oleh Ijen. 4. Koordinasi persiapan pengadaan untuk peninjauan KAP.

RENCANA AKSI TRIWULAN IV TA.2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		sd Triwulan IV	
					Target Fisik(%)	Realisasi Kegiatan
					5	6
1	Meningkatnya daya saing industri pengolahan non migas	Peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri	1 Kolaborasi	1 Kolaborasi	100	Pelaksanaan koordinasi dengan PT. Pupuk Kujang mulai dari proses penyusunan MoU sampai pelaksanaan kolaborasi Pengujian dan Penyusunan Laporan Relative Accuracy Test Audit (RATA Test) untuk mendukung sistem pemantauan emisi secara terus menerus (Continuous Emission Monitoring System).
2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	Peningkatan peran Balai dalam pengembangan industri	4 Perusahaan	5 Perusahaan	100	Pelaksanaan dan penyelesaian Kerjasama BBSPJPPi sesuai SIPK Kerjasama untuk peningkatan peran Balai dalam pengembangan industri terkait dengan: 1) Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi dengan PT Retota Sakti, RS Ken Saras, CV Saprotan, dan 2) Implementasi Mutu/Standar dengan PT. Kawasan Industri Kendal dan BP Batam.
3	Meningkatnya kemampuan industri Dalam dan Jasa Dalam Negeri	1. Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi	10 Porsen	18,38 Porsen	100	-Telah dilakukan pengajuan proposal dan seleksi untuk kegiatan DAPATI TA 2022, dimana BBSPJPPi mendapat persetujuan untuk 4 kegiatan DAPATI. -Proses pendampingan untuk mendukung peningkatan produktivitas/efisiensi pada 4 IKM terpilih -Perhitungan peningkatan n produktivitas/efisiensi rata-rata pada perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi DAPATI.
		2. Meningkatnya utilitas layanan jasa industri di dalam negeri	2 Porsen	41,37 Porsen	100	•Promosi jasa layanan BBSPJPPi baik secara offline (pelaksanaan Business Gathering) maupun online dengan memanfaatkan media sosial balai. •Pemberian jasa layanan ke industri sesuai permintaan yang disepakati •Pengelolaan keuangan dan pencatatan penerimaan PNBIP untuk setiap jasa layanan pada TA 2022
		3. Peningkatan jumlah lingkup layanan jasa industri di dalam negeri	3 Ruang Lingkup	4 Ruang Lingkup	100	•Telah dilakukan pengajuan perluasan ruang lingkup akreditasi untuk laboratorium kalibrasi •Pelaksanaan Asesmen KAN untuk Reakreditasi laboratorium kalibrasi dan pengajuan perluasan ruang lingkup untuk lingkup kalibrasi alat gas analyser-CO, gas analyser-NO, gas analyser-SO2 dan thermometer digital
		4. Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	58 Porsen	88,11 Porsen	100	•Telah dilakukan pengisian aplikasi P3DN untuk rencana pengadaan B/J pada satker BBSPJPPi tahun 2022 •Telah dilakukan pengajuan persetujuan tertulis kepada Menpersu untuk pengadaan barang/jasa yang dipenuhi dari impor atau TKDN di bawah 25% •Bagian keuangan BBSPJPPi telah melakukan tagging realisasi TKDN (PDN, TKDN, Non PDN) atas realisasi belanja pada aplikasi e-Mon APBN •Pencatatan penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa pada akun terpilih (521211 ; 521219; 521811; 522192; 524114; 521111 ; 521131; 522141; 524119; 522131; 522191; 521241; 521841; 532111; 533111)
4	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditundaklanjuti oleh satker	92%	100%	100	•Pelaksanaan audit kinerja dalam rangka pengawasan internal pada unit kerja BBSPJPPi oleh Tim Inspektorat III Kementerian Perindustrian •Penyusunan dan penyampaian Rencana Aksi tindak lanjut hasil pengawasan •Penyampaian dokumen bukti tindak lanjut hasil pengawasan. •Penerbitan surat penyelesaian hasil audit kinerja oleh Ijen.
5	Terselenggaranya Urusan Penerimaan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap jasa layanan industri	3,6	3,66	100	•Pelaksanaan survey kepuasan pelanggan TA 2022. •Evaluasi atas hasil kuisioner kepuasan pelanggan.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		sd Triwulan IV	
					Target Fisik(%)	Realisasi Kegiatan
6	Terwujudnya ASN BSKJI yang Profesional	1.Rata-rata indeks profesionalitas ASN	76	77,07	100	<ul style="list-style-type: none"> •Fasilitasi dan monitoring realisasi diklat 20 JPL dan workshop/Bimtek/Seminar/Webinar. •Peningkatan informasi peningkatan kompetensi ASN pada aplikasi My SAPK.
		2.Nilai Disiplin pegawai	82	83,10	100	<ul style="list-style-type: none"> •Mengingatkan setiap pegawai untuk log in pada jam masuk dan log out pada jam pulang di intranet (setiap jam kerja). •Evaluasi bulanan terhadap capaian nilai disiplin satker.
7	Penguatan Layanan Publik	Nilai minimal indeks layanan publik	A-	A	100	<ul style="list-style-type: none"> •Tersedia dan terselenggaranya Standar Pelayanan (SP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. •Pemutakhiran/update sistem informasi digital secara berkala memuat proses bisnis, informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. •Informasi layanan publik tersaji pada desk layanan publik, website dan medsos. •Terselenggaranya Informasi dan promosi layanan BBSPPPI melalui OASIS , BG dan FGD. •Update Standar pelayanan dan pengelolaan informasi public (SK, Banner/leaflet, websit dan Sstim Informasi). •Fast respon terhadap complain/keluhan pelanggan/saran dan masukan.
8	Penguatan Akuntabilitas Organisasi	1.Nilai minimal akuntabilitas kinerja	81	81,65	100	<ul style="list-style-type: none"> •Penyiapan data dukung penilaian SAKIP tahun 2021 sesuai Permenpan RB 88/2021 •Penilaian evaluasi SAKIP tahun 2021 oleh Tim Inspektorat III Kementerian Perindustrian •Penyiapan dokumen tindak lanjut rekomendasi hasil penilaian SAKIP tahun 2021 •Penyusunan dokumen akuntabilitas kinerja tahun berjalan (PP 39 Triwulan LI,III,IV dan LAKIP 2022)
		2.Nilai minimal laporan keuangan	91	97	100	<ul style="list-style-type: none"> •Pelaksanaan audit laporan keuangan tahun 2021 oleh Kantor Akuntan Publik. •Penilaian Laporan Keuangan BBSPPPI TA 2021 oleh Biro Keuangan •Penyusunan Laporan Keuangan tahun 2022. •Pelaksanaan Review Laporan Keuangan tahun 2022 oleh Inspektorat III Kemenperin

Realisasi Keuangan Berdasarkan Renstra BBSJPPI TA. 2021-2024

Sasaran Kegiatan (output)/Indikator	2021			2022			2023			2024			TOTAL 2021-2024			
	Target Renstra (RP)	Target Perkin (RP)	Realisasi (RP)	Realisasi/Perkin (%)	Target Renstra (RP)	Target Perkin (RP)	Realisasi (RP)	Realisasi/Perkin (%)	Target Renstra (RP)	Target Perkin (RP)	Realisasi (RP)	Realisasi/Perkin (%)	Target Renstra (RP)	Target Perkin (RP)	Realisasi (RP)	Realisasi/Perkin (%)
1																
Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Non Migas																
Peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri	80,000,000	210,910,000	183,821,403	88.10	100,000,000	219,870,000	215,146,806	97.85	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100.00	430,780,000	430,780,000	400,962,309	93.08
2																
Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0																
Peningkatan peran bali dalam pengembangan industri	430,570,000	448,585,000	96,977,840	21.62	433,820,000	192,530,000	189,124,866	98.23	433,820,000	433,820,000	433,820,000	100.00	1,732,030,000	641,115,000	286,102,706	44.63
3																
Meningkatnya Kemampuan Industri Barung dan Jasa Dalam Negeri																
Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi																
Meningkatnya utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri	2,074,855,000	678,612,300	588,193,918	86.68	1,619,635,000	4,714,538,000	4,701,468,023	99.72	6,339,370,000	6,320,900,000	6,320,900,000	100.00	16,954,760,000	11,500,661,000	10,583,401,941	92.02
4																
Peningkatan jumlah lingkup layanan jasa industri di dalam negeri	7,561,688,000	661,970,000	416,995,490	62.99	5,468,938,000	1,825,820,000	1,801,848,841	98.69	7,672,450,000	10,775,000,000	31,478,076,000	2,487,790,000	2,487,790,000	2,218,844,331	89.19	
5																
Pemerataan nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	592,030,000	2,728,723,000	1,730,972,794	63.44	2,786,240,000	3,966,530,000	3,808,856,930	96.02	915,610,000	841,240,000	5,135,120,000	6,695,253,000	6,695,253,000	5,539,529,724	82.74	
6																
Tercapainya Penguasaan Internal Yang Efektif dan Efisien	24,060,000	63,920,000	28,879,176	45.18	48,440,000	28,540,000	27,952,303	97.94	61,860,000	61,680,000	195,860,000	92,460,000	92,460,000	56,831,479	61.47	
7																
Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh asiter																
8																
Terseleenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan	5,604,757,000	555,515,000	254,183,493	45.76	5,981,765,000	300,660,000	293,610,624	97.65	5,932,050,000	6,451,487,000	23,970,059,000	856,175,000	856,175,000	547,794,117	63.98	
9																
Rate-rata indeks profesionalitas ASN	132,293,000	132,293,000	85,932,356	64.95	422,770,000	336,530,000	325,866,893	96.84	425,420,000	425,420,000	1,405,903,000	468,823,000	468,823,000	411,819,249	87.84	
10																
Nilai disiplin pegawai	12,311,585,000	12,035,262,000	11,821,877,700	98.29	14,132,264,000	14,147,380,000	14,102,515,082	99.68	17,043,450,000	17,155,764,000	60,645,063,000	26,182,642,000	26,182,642,000	25,924,292,782	96.01	
11																
Penguatan Layanan Publik	686,135,000	5,966,917,000	5,341,411,143	89.52	516,680,000	5,610,920,000	5,324,912,000	94.90	751,340,000	716,680,000	2,670,835,000	11,577,837,000	11,577,837,000	10,656,323,145	92.13	
12																
Nilai minimal Indeks layanan publik																
13																
Penguatan Akuntabilitas Organisasi	81,430,000	41,570,000	7,031,000	16.91	68,690,000	33,900,000	33,775,481	99.63	72,545,000	72,545,000	295,210,000	75,470,000	75,470,000	40,806,481	54.07	
14																
Nilai minimal akuntabilitas kinerja	107,385,000	55,000,000	55,000,000	100.00	114,780,000	114,780,000	114,701,918	99.93	114,780,000	114,780,000	451,725,000	159,780,000	159,780,000	169,701,918	99.95	
15																
Nilai minimal laporan keuangan																

Capaian Kinerja Renstra BBSJPPI TA. 2021-2024

Sasaran Kegiatan (output)/Indikator	2021			2022			2023	2024	TOTAL 2021-2024		
	Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Target Renstra	Total Target Renstra	Realisasi sd 2021	%
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatnya daya saing industri pengolahan non migas											
Peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri	1	2	200	1	1	100	1	1	4	3	75
2 Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0											
Peningkatan peran balai dalam pengembangan industri	3	7	233	4	5	125	5	5	17	12	71
3 Meningkatkan kemampuan industri Barang dan Jasa Dalam Negeri											
1. Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi	NA	NA	NA	10	18.38	184	10	10	30	18.38	61
2. Meningkatkan utilitas layanan jasa industri di dalam negeri	2	26	1.300	2	41.37	2069	3	4	11	67.37	612
3. Peningkatan jumlah lingkup layanan jasa industri di dalam negeri	3	6	200	3	4	133	3	3	12	10	83
4. Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	55	58	105	55	88.11	160	62	65	237	146.11	62
4 Terecapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien											
Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh stakeholder	91.5	100	109	92	100	109	92.5	93	369	200	54
5 Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan											
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap jasa layanan industri	3.6	3.65	101	3.6	3.66	102	3.6	3.6	14.4	7.31	51
6 Terwujudnya ASN BSK.II yang Profesional											
1. Rata-rata indeks profesionalitas ASN	74	66	89	76	77.07	101	78	80	308	143.07	46
2. Nilai Disiplin pegawai	81	84	104	82	83.1	101	83	85	331	167.1	50
7 Penguatan Layanan Publik											
Nilai minimal indeks layanan publik	A-	A-	100	A-	A	114	A-	A-			
8 Penguatan Akuntabilitas Organisasi											
1. Nilai minimal akuntabilitas kinerja	80.5	82.44	102	81	81.65	101	81.5	82.5	325.5	164.09	50
2. Nilai minimal laporan keuangan	90	92	103	91	97	107	92	93	366	189.3	52

Realisasi Anggaran Kegiatan TA. 2022

Komponen/ Subkomponen/		Anggaran		
		Pagu	Realisasi	%
1		2	3	4
6077.BAD	Pelayanan Publik kepada Industri	6.952.758.000	6.907.582.536	99,35
6077.CAH	Sarana Bidang Industri dan Perdagangan	1.500.000.000	1.459.197.200	97,28
6042.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	19.772.420.000	19.441.324.039	98,33
6042.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	2.388.250.000	2.275.171.080	95,27
6042.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	674.910.000	663.747.860	98,35
6042.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	203.660.000	192.371.702	94,46
	TOTAL	31.491.998.000	30.939.394.417	98,25

**Realisasi Anggaran Kegiatan Per Triwulan
Tahun 2022**

Kegiatan/Komponen/ Subkomponen	Anggaran (000)	Triwulan I (%)		Triwulan II (%)		Triwulan III (%)		Triwulan IV (%)		Realisasi
		T	R	T	R	T	R	T	R	
	31.491.998							100	98,25	30.939.394,417
1 Pelayanan Publik Kepada Industri	6.952.758	18,69	18,69	29,70	29,50	33,75	33,90	29,41	32,08	6.907.582,536
2 Sarana Bidang Industri dan Perdagangan	1.500.000	-	-	-	-	12,30	12,30	87,70	84,97	1.459.197,200
3 Layanan Dukungan Manajemen Internal	19.772.420	15,95	14,11	26,54	31,58	20,81	26,11	33,45	30,34	19.441.324,039
4 Layanan Sarana dan Prasarana Internal	2.388.250	-	-	9,28	9,28	18,89	18,89	69,75	65,01	2.275.171,080
5 Layanan Manajemen SDM Internal	674,91	5,64	5,64	3,45	3,45	32,50	32,50	58,49	58,72	663.747,860
6 Layanan Manajemen Kinerja Internal	203,66	30,36	30,36	6,97	6,97	25,09	27,05	27,90	27,54	192.371,702

Realisasi Keuangan Berdasarkan Indikator Perjanjian Kinerja Tahun 2022									
No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Komponen/ Subkomponen	Anggaran		%
							Pagu	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Non Migas	Peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri	1 Kegiatan Kolaborasi	1 Kegiatan Kolaborasi	100	Jasa Pelayanan Optiransi Pemanfaatan Teknologi	Rp 215,140,806	97,85%	
2	Pengisian implementasi Madang Indonesia 4.0	Peningkatan peran bali dalam pengembangan industri	4 perusahaan	5 Perusahaan	125	Jasa Belayanan Pelatihan Teknis	Rp 189,124,866	98,23%	
3	Meingkatkan kemampuan industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	1. Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultansi 2. Meningkatnya utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri	10%	18,38%	184	Jasa Konsultansi DAPATI (penganggaran kegiatan DAPATI 2022 berada pada DIPA Pusa OPTIKI BSKJ)	Rp -	0,00%	
			2%	41,37%	2069	- Jasa Pelayanan Teknis Kalibrasi. -Layanan Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu -Layanan Pengujian Aneka Komoditi dan Produk Halal. -Layanan Pengujian Pengendalian Pencemaran. -Layanan Sertifikasi Produk. -Layanan Sertifikasi Manajemen Lingkungan. -Layanan Sertifikasi Industri Hijau. -Layanan Audit Energi	Rp 4,714,539,000	99,72%	
		3. Peningkatan jumlah lingkup layanan jasa industri di dalam negeri	3 Ruang Lingkup	4 Ruang Lingkup	133	-Koordinasi Peningkatan Layanan dan Operasional Laboratorium Pengujian -Koordinasi Peningkatan Layanan dan Operasional Lembaga Sertifikasi.	Rp 1,825,820,000	98,69%	
		4. Peningkatan nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	58%	88,11%	160	-Pengadaan peralatan inventaris perkantoran -Pelayanan Tata Ujaha dan Rumah Tangga -Pengadaan perangkat pengolahan data dan komunikasi. -Pembangunan/renovasi Cidung dan Bangunan -Pengadaan peralatan fasilitas laboratorium/workshop/layanan	Rp 3,966,830,000	96,02%	
4	Tercapainya Penguasaan Internal yang Efektif dan Efisien	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	92%	100%	109	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	Rp 27,952,303	97,94%	
5	Terwujudnya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap jasa layanan industri	3,6	3,66	102	-Pelaksanaan pemantauan/promosi/pameran/publikasi layanan tebris. -Pengelolaan Majalah/Jurnal Ilmiah dan Publikasi KTI	Rp 293,610,624	97,66%	
6	Terwujudnya ASN BSKJ yang Profesional	1. Rata-rata indeks profesionalitas ASN	76	77,07	101	-Pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional -Pendidikan dan Pelatihan teknis -Pendidikan dan Pelatihan Tebis ASN	Rp 325,886,893	96,84%	
		2. Nilai Disiplin pegawai	82	83,10	101	-Pengelolaan/manajemen SDM -Caji dan Tunjangan	Rp 14,102,415,082	99,68%	

7	Pengantian Sistem Informasi Ternegasi, Kolaborasi dan Layanan Publik	Nilai minimal indeks layanan publik	A- (Standar Nilai 4,01-4,50)	A (Standar Nilai 4,5-5,0)	100	-Pengelolaan data dan Informasi. -Pelaksanaan Reformasi Birokrasi/Zona Integritas/SIP -Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor. -Langganan daya dan jasa -Operasional IPAL -Operasional Perkantoran dan Pimpinan -Pemeliharaan Alat Laboratorium -Pemeliharaan kendaraan Operasional -Pemeliharaan Sarana Kantor -Pengadaan Bahan Makanan dan Minuman -Penambah Daya Tahan Tubuh	Rp 5.610.920.000	Rp 5.324.912.000	94,90%
8	Pengantian Akuntabilitas Organisasi	1. Nilai minimal akuntabilitas kinerja 2. Nilai minimal Laporan Keuangan	81	81,65	101	Penyusunan rencana program dan anggaran	Rp 33.900.000	Rp 33.775.481	99,63%
		91	97	107	Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan	Rp 114.780.000	Rp 114.701.918	99,93%